

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

1. Fungsi Masjid

Dalam kamus “fungsi” itu berarti jabatan (pekerjaan) yang dilakukan; kegunaan suatu hal¹. Sedangkan kata Masjid itu berasal dari kata *sajada – yasjudu – sujudan*. Fiil *sajada* kemudian ditambahi *ma* sebagai sebab dari terjadinya *isim makan* yang merubah bentuk kata *sajada* menjadi *masjada-masjidu-masjid*² yang berarti tempat untuk bersujud atau masjid.

Yusuf Qardhawi dengan mengambil makna dari Q.S. an-Nur: 36-37, mengatakan bahwa masjid adalah “rumah”, yakni rumah Allah SWT yang dibangun agar umat -Islam- mengingat, mensyukuri dan menyembah-Nya dengan baik³. Maka fungsi masjid di sini berarti kegunaan masjid bagi umat Islam, diantaranya seperti yang dikatakan oleh Sidi Gazalba, yakni masjid sebagai tempat ibadah dan pusat kebudayaan Islam.

Fungsi masjid sebagaimana sunnah Rosulullah SAW ialah; sebagai tempat ibadah (shalat, zikir), tempat konsultasi dan komunikasi, tempat pendidikan, tempat pelayanan sosial, tempat perdamaian dan pengadilan

¹ Pusat Bahasa Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi ketiga. (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), hlm. 322.

² Lihat A.W. Munawwir, *Kamus al-Munawwir; Arab-Indonesia Terlengkap*, editor: KH Ali Ma'shum & KH Zainal Abidin Munawwir (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hlm. 610.

³ Yusuf al-Qardhawi, *Tuntunan Membangun Masjid* (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), hlm. 7.

sengketa, aula dan tempat menerima tamu, pusat penerangan dan pembelaan agama, dan lain sebagainya⁴.

2. Media Pembelajaran Demokrasi

Media berarti alat; perantara; penghubung atau yang terletak di antara dua pihak (orang, golongan dan sebagainya)⁵.

Pembelajaran berasal dari kata “belajar” yang diberi imbuhan senyawa (konfiks) -yakni imbuhan berupa awalan dan akhiran yang melekat di depan maupun di belakang kata dasar atau kata jadian⁶-, “pe- an” yang mempunyai fungsi membentuk kata benda yang menyebabkan terjadinya kegiatan belajar.

Demokrasi adalah “*Demos*” artinya rakyat, “*Kratia*” artinya pemerintahan. Jadi istilah demokrasi berarti pemerintahan dari rakyat untuk rakyat, atau pemerintahan oleh mereka yang diperintah, atau suatu pola pemerintahan yang mana kekuasaan untuk memerintah berasal dari mereka yang diperintah, atau pola pemerintahan yang mengikutsertakan secara aktif semua anggota masyarakat dalam keputusan yang diambil oleh mereka yang diberi wewenang⁷.

Maka pembelajaran demokrasi adalah suatu kegiatan yang menimbulkan unsur belajar bagi rakyat, untuk mencapai pemaknaan serta pemahaman sebuah pola pemerintahan yang secara teori sangat

14. ⁴ Seperti disarikan dalam Buletin Idul Fitri Masjid Jogokariyan, edisi 9/1425 H, hlm.

⁵ Pusat Bahasa Depdiknas, *op.cit.* hlm. 726.

⁶ EM Zulfajri & Ratu Aprillia Senja, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (t.t : Difa Publisher, t.th), hlm.904.

⁷ A. Henkesj & Yulia Gunawan, *Ensiklopedi Populer; Politik Pembangunan Pancasila*, edisi VI (Jakarta: PT Kencana Dwi Surana Sajati, 1988), hlm. 173

membutuhkan adanya peran aktif rakyat, atau sebuah pola pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

3. Pemilu Raya

Yang dimaksud pemilu raya di sini ialah sebuah kegiatan pemilihan kepengurusan takmir masjid, pemilu tersebut diikuti bukan hanya oleh orang dalam kepengurusan masjid saja, akan tetapi ruang lingkupnya telah melebar keluar, yakni masyarakat setempatlah yang memilih anggota kepengurusan masjid tersebut⁸.

Pemilu raya ini diselenggarakan di masjid Jogokariyan, yang terletak di kelurahan Mantriheron, kecamatan Mantriheron, Yogyakarta. Masjid ini telah melakukan 4 kali pergantian kepengurusan takmir. Dimulai sejak tahun 1985, kemudian tahun 1990 yang kedua, tahun 1995 yang ketiga dan keempat tahun 2000. Dan pemilu raya masjid Jogokariyan kelima dilaksanakan pada tanggal 19 Desember 2004⁹.

Pemilu raya inilah yang dijadikan sebagai objek penelitian, sekaligus sebagai argumentasi bagi konsep fungsi masjid sebagai media pembelajaran demokrasi.

Maka yang dimaksud judul Fungsi Masjid Sebagai Media Pembelajaran Demokrasi (Studi Kasus Pemilu Raya Takmir Masjid Jogokariyan) adalah sebuah penganalisaan terhadap kegiatan pemilu raya

⁸ Kedaulatan Rakyat, Sabtu Wage 18 Desember 2004/ 6 Dulkangidah 1937 Tahun LX No. 80.

⁹ Wawancara bersama ketua Takmir masjid Jogokariyan 2004-2008, Bapak Muhammad Jazir, ASP. Tanggal 21 Mei 2005.

sebagai contoh sekaligus membuktikan kemungkinan masjid berfungsi menjadi media pembelajaran berdemokrasi bagi jamaahnya.

B. Latar Belakang

Islam sebagai agama *rahmatan lil 'alamin*, menghendaki kebahagiaan dunia serta akhirat bagi seluruh alam. Oleh karena itu Islam tidak hanya melulu mengurus masalah keduniawian semata atau hanya keakhiratan saja, Islam secara komprehensif memadukan antara keduanya, sehingga hubungan antara dunia dan akhirat menjadi sangat erat dalam pandangan Islam.

Masjid adalah tempat beribadah bagi kaum Muhammad, dalam sejarahnya masjid merupakan salah satu faktor keberhasilan perkembangan Islam. Namun sejatinya jika kita ditanya apa arti dari Masjid itu, maka acuan yang sering kita gunakan adalah sesuatu yang telah terbiasa kita pahami sehari-hari, masjid sebagai tempat bersujud, sembahyang shalat, itu saja. Ini fenomena yang terjadi, hanya segelintir orang muslim yang lebih jauh tahu tentang peranan masjid yang sesungguhnya bagi masyarakat.

Dampak dari itu semua akhirnya menjadikan pengerucutan fungsi masjid, yang hanya dipahami sebagai tempat penebusan dosa serta ibadah mahdhah yang sakral semata, umat Islam mulai banyak meninggalkan masjid dan lebih memilih tempat lain untuk berbagai aktifitas profan mereka, terutama yang menyangkut sosial, ekonomi, politik dan pendidikan, entah mereka sadar atau tidak merasa tapi itu nyata adanya, baik di desa maupun kota.

Jika kita menengok sejenak ke belakang, tentang gambaran peranan masjid terhadap kehidupan umat Islam, melalui penelusuran sejarah kedatangan Islam di Madinah, yang diawali peristiwa hijrah Rosulullah SAW, maka dari sejarah tersebut kita diberi pelajaran apa sesungguhnya peran masjid bagi umat Islam.

Gazalba mengatakan hijrah Nabi adalah sebuah taktik politik yang jitu, ketika Rasulullah SAW kira-kira telah 12 tahun melakukan perjuangan di Makkah¹⁰, namun buah yang dituai selalu saja penindasan terhadap umat Islam -saat itu baru tumbuh- yang dilakukan oleh kaum Quraisy. Di sini menarik untuk disimak, mengapa di Madinah Islam cepat berkembang walau hampir selalu mendapat perlawanan dari kaum Yahudi.

Dalam perjalanan menuju Madinah, Rasulullah SAW bersama sahabat Abu Bakar r.a singgah di Quba terlebih dahulu, beberapa kilometer dari Yastrib (Madinah), namun ternyata Rasulullah SAW tidak hanya sekedar singgah, akan tetapi mereka berdua sempat mendirikan masjid di atas tanah wakaf dari Kulstum bin Hadam, yang kemudian dikenal dengan nama masjid Quba¹¹.

Setelah Rasulullah SAW sampai di Madinah, hal pertama yang menjadi agenda pembangunan Islam ialah pembangunan masjid¹² sebelum mempersaudarakan antara Muhajirin dengan Anshar.

¹⁰ Sidi Gazalba, *op. cit*, hlm. 120.

¹¹ Ahmad Yani, *Panduan Memakmurkan Masjid*, cet. III (Jakarta: Pustaka Tarbiatuna, 2003), hlm. 1.

¹² Menurut Gazalba ...*pembangunan masjid adalah manifestasi keadaan Islam dan masyarakat Muslim dalam tiap ruang dan waktu.....sehingga menimbulkan konsep masjid adalah lambang Islam. Lihat Sidi Gazalba, op. cit*, hlm. 267.

Dalam bukunya Ahmad Yani disebutkan pula dengan gamblang mengenai peranan dan fungsi masjid pada masa Rasulullah SAW diantaranya:

- a. Tempat peribadatan
- b. Tempat pertemuan dan tempat bermusyawarah
- c. Tempat perlindungan
- d. Tempat kegiatan sosial
- e. Tempat pengobatan orang sakit
- f. Tempat latihan dan mengatur siasat perang
- g. Tempat penerangan dan madrasah ilmu
- h. Tempat berdakwah¹³

Gazalba sendiri merumuskan fungsi masjid itu ialah sebagai tempat ibadah serta pusat kebudayaan¹⁴. Makna dari pengertian itu sangat luas, sehingga hampir seluruh aktifitas umat Islam itu ada dan dapat diberdayakan lewat masjid.

Keterangan di atas dengan jelas menggambarkan betapa besar fungsi masjid yang sebenarnya, jadi pantaslah jika masjid dikatakan sebagai pusat kehidupan Islam dan dari sanalah Islam memancarkan hakikatnya. Memang diakui bahwa untuk sebagian fungsi tersebut telah banyak dibuat spesifikasi tempat dan tanggung jawab tertentu pada zaman setelah Rasulullah SAW dan para sahabat, namun itu semua tidak menghapuskan peran dan fungsi masjid yang telah disebutkan, dengan asumsi awal yang dipakai bahwa masjid adalah

¹³ *Ibid*, hlm. 11-22.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 316

jantung kehidupan bagi umat Islam, dan melalui masjid tersebut Islam melakukan tugasnya sebagai agama.

Menurut Ali Syari'ati, seperti yang dikutip oleh Eko Supriyadi, Islam adalah agama yang diturunkan untuk membela kaum tertindas –*mustad'afin*– dan meluruskan perjalanan sejarah dari kekuasaan kaum tiran menjadi kekuasaan kelompok tercerahkan, berpihak pada kelas bawah bersama orang-orang yang berada di jalan Tuhan¹⁵, inilah pandangannya yang kemudian beliau uraikan sebagai landasan sosialisme Islam.

Tugas agama menurut teori fungsi sosial agama Durkheim, ialah sebagai pendukung dan pelestari masyarakat yang telah ada. Kemudian teori ini oleh banyak penulis dielaborasi menjadi sifat agama yang bersifat fungsional terhadap persatuan dan solidaritas sosial¹⁶. Seperti yang dikatakan Hotman M. Siahaan, dia juga menolak teori yang mengatakan agama berasal dari evolusi animisme menuju monoteisme. Menurutnya agama adalah perwujudan dari *collective consciouness* (kesadaran kolektif) yang kemudian menjelma menjadi *collective representation* yakni berupa lambang-lambang yang berwujud ajaran-ajaran totemism. Durkheim mengemukakan dua hal pokok dalam agama, yaitu apa yang disebut kepercayaan dan apa yang disebut “ritus” atau upacara. Yang pertama adalah bentuk dari pikiran dan yang kedua merupakan tindakan¹⁷. Dia mengatakan *...the idea of society is the soul of*

¹⁵ Eko Supriyadi, *Sosialisme Islam; Pemikiran Ali Syari'ati*, cet I (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 136.

¹⁶ Betty. R. Scraft, *The Sosiological Study of Religion*, penterj. Machnun Husein (ed.), cet I (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1995), hlm. 93.

¹⁷ Hotman M. Siahaan, *Pengantar ke Arah Sejarah dan Teori Sosiologi*, cet. II (Jakarta: Erlangga, 1986), hlm.156.

religion, keber-agama-an menjadi dasar akan adanya sebuah ide kemasyarakatan. Karena ekspresi keagamaan adalah sebuah lukisan dari *social life*, sehingga menjadi sebuah keharusan adanya agama pada suatu masyarakat¹⁸.

Sedang August Comte mengatakan bahwa agama adalah sebuah jenjang pemikiran manusia yang paling awal, dia sebut dengan *the theological* yang mempunyai tiga tingkatan, *fetishism*, *polytheism* dan *monotheism*. Tingkat pertama dapat diartikan dengan animisme, kemudian yang kedua kepercayaan kepada para dewa sedang yang ketiga sebagai penyimpulan bahwa hanya ada satu dewa atau penguasa yang membawahi sekian banyak dewa atau penguasa, itulah yang kemudian disebut Penguasa Tunggal¹⁹.

Comte juga terkenal dengan teorinya yang membagi sosial menjadi dua; *social statics*, suatu studi tentang hukum-hukum aksi dan reaksi antara bagian-bagian dari suatu sistem sosial. Bagian menjadi unsure paling elementer dari sosiologi. Yang kedua; *sosial dynamics*, didefinisikan sebagai teori tentang perkembangan dan kemajuan masyarakat manusia²⁰. Dari sini bisa dikatakan pula menurut comte agama itu adalah bagian dari *sosial statics*, sebagai hasil dari pemikiran atau perkembangan manusia yang berfungsi sebagai hukum atau aturan dari aksi dan reaksi dari masyarakat.

Menurut keduanya diatas, agama adalah buah pemikiran manusia disebabkan adanya kesadaran yang secara tidak langsung mengartikan bahwa manusia membutuhkan sebuah aturan atau pedoman dalam menjalani

¹⁸ *Ibid*, hlm. 157.

¹⁹ Lebih lengkapnya baca Hotman M. Siahaan, *Ibid*, hlm.106-107

²⁰ *Ibid*, hlm. 105.

kehidupannya, dan itu mereka temukan ada pada agama. Maka tepat kiranya jika agama memang telah menjadi fitrah manusia, tak bisa ditolak karena mereka dengan kesadaran sendiri sangat membutuhkannya.

Oleh karenanya sekali lagi agama menjadi sangat penting dalam kehidupan. Namun seperti dikatakan diatas, bahwa agama berpotensi menjadi aturan yang menyatukan setiap individu dalam masyarakat dan juga berpotensi menjadi sebuah pemicu perpecahan antara masyarakat. Ini dikarenakan pemikiran manusia terus berkembang dan banyaknya interpretasi terhadap ajaran agama.

Masyarakat atau suatu kelompok sosial bukanlah sesuatu yang statis, akan tetapi terus bergerak secara dinamis, saling berinteraksi satu dengan yang lainnya dari satu bidang ke bidang kehidupan yang lain, maka sangat dimungkinkan terjadinya fluktuasi solidaritas di antara mereka, terutama setiap dari mereka memiliki kepentingan yang berbeda-beda, sehingga dari kepentingan yang berbeda-beda tersebut sangat potensial untuk terjadinya suatu konflik.

Masyarakat yang ada terus bergerak dengan naluri sosial mereka yang terus dibayangi individualis disampingnya, dapat sekali untuk berkembang, dengan syarat ada aturan serta sarana untuk menjadikan mereka mengalami perkembangan yang diharapkan.

Dalam kehidupan masyarakat, agama adalah sebuah aspek yang paling potensial untuk membentuk sebuah persatuan dan kesatuan sekaligus

berpotensi menjadi penyebab konflik yang paling kuat. Masalahnya seberapa jauh mereka memahami secara baik apa makna dan tujuan agama tersebut.

Dalam hal ini mensakralkan agama menjadi sangat berbahaya sekali, apalagi sampai memisahkan agama dari yang profan. Agama seharusnya menjadi petunjuk jalan, menjadi pegangan hidup dan sekaligus menjadi pemenuhan kebutuhan rohani bagi umatnya.

Dalam pergerakan sosial ini Islam memfungsikan masjid -sebagaimana Rasulullah SAW dan para sahabat telah memfungsikannya-, Islam menjadikan masjid sebagai sebuah tempat dimana agama Islam tersebut bisa difungsikan, hal ini tertera dengan jelas dalam dua sumber pokok agama Islam yakni al-Quran dan sunnah-sunnah Rosulullah SAW. Jadi pemisahan masalah profan dari masjid sebenarnya sangat bertentangan sekali dengan ruh Islam sekaligus fungsi sosial agama itu sendiri.

Ringkasnya masjid merupakan sebuah tempat yang menggambarkan tingkat keberhasilan pengembangan Islam. Masjid merupakan tempat beribadah kaum muslim sekaligus sebagai tempat kebudayaan Islam.

Berbicara masalah masjid, baru-baru ini telah berlangsung sebuah kegiatan yang penulis pandang baru bagi kegiatan masjid, yakni sebuah kegiatan pemilihan umum takmir masjid. Dalam kegiatan itu dilaksanakan pemilihan ketua takmir oleh penduduk setempat, menurut informasi ada sekitar 887 kepala keluarga.

Pemilu tersebut merupakan ajang sosialisasi masjid, sehingga masyarakat diharapkan dapat merasa akrab dengan masjid²¹. Sosialisasi masjid itu mencakup laporan kegiatan, laporan keuangan, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan masjid.

Ini sebuah kegiatan yang sangat menarik, setelah bergulirnya isu-isu politisasi masjid –sebenarnya masih dipertanyakan, seperti apa politisasi masjid itu²²?- yang sebenarnya itu adalah sebuah kesuksesan Orde Baru dalam menerapkan modernisasi politik, dan sangat berdampak sekali bagi masyarakat terutama umat Islam. Orde Baru berpandangan bahwa budaya politik yang berakar pada “budaya-budaya lokal”, termasuk unsur agama, telah menjadi salah satu pemicu konflik politik, sehingga salah satu langkah penting adalah mencerabut budaya politik dari akar kultur lokal tersebut. Pandangan ini diwujudkan, salah satunya dengan upaya pemberlakuan Pancasila sebagai satu-satunya asas²³. Partai politik yang tidak sejalan atau tidak didasarkan kepada asas tunggal Pancasila, mereka tumbangkan dan adanya kewajiban bagi beberapa pihak untuk mendukung salah satu partai, jika tidak ingin dicopot dari jabatannya.

Dampak dari penerapan modernisasi politik Orde Baru ini dirasakan secara pasti terhadap politik Islam. Sebagaimana disebutkan di awal bahwa

²¹ Wawancara dengan ketua KPT masjid Jogokariyan, Pak Nur, tanggal 10 april 2005.

²² Menurut KH. M. Yusuf Hasyim kegiatan politik di masjid tidak harus dihentikan, pernyataan tersebut sebagai kesimpulan beliau dari peristiwa 2 Maret 2001, yakni ‘jumaatan politik’ yang dilakukan oleh para elit politik yang melibatkan enam pimpinan partai besar, sejumlah tokoh ormas dan anggota DPR/MPR serta diikuti oleh Taufik Kiemas. Yang kemudian kegiatan tersebut diklaim sebagai ‘politisasi agama’ bahkan disebut sebagai ‘kudeta konstitusional’. Lengkapnya lihat *Republika*, Jumat, 9 Maret 2001, hlm. 4.

²³ Kacung & Ma'mun Murod al-Brebesy (ed.), *Abdurrahman Wahid: Mengurai Hubungan Agama dan Negara*, (Jakarta: PT Grasindo, 1999), hlm. 9.

Islam tidak mengenal sekularisasi²⁴, sehingga ketika politik dipisahkan dari unsur agama, maka itu menjadi sangat bertentangan dengan ajaran Islam, terutama politik Islam.

Setelah penerapan modernisasi politik Orde Baru, respon umat Islam terhadapnya, yang diartikulasikan melalui ideologisasi atau repolitisasi Islam, jelas sekali tidak menerima pemisahan tersebut, terlebih kalangan intelektualnya, mereka dipaksa untuk melakukan usaha-usaha interpretasi ulang dan penyesuaian-penyesuaian strategis sehingga umat Islam setidaknya tetap dapat eksis dalam gejolak perubahan tersebut²⁵.

Maka dari pihak pemerintah dengan secara berlebihan mencurigai kubu umat Islam sebagai penghambat proses akselerasi modernisasi dan pembangunan ekonomi lewat ideologi pancasila, sehingga tak ayal lagi selama dua dasawarsa pertama kekuasaan Orde Baru, umat Islam sering ditempatkan pada posisi *ideological scapegoat*, dikambinghitamkan dalam pergumulan politik²⁶.

Suasana ini dibaca oleh Nurcholish Madjid sebagai seorang yang aktif dalam HMI (Himpunan Mahasiswa Islam)-, sebagai situasi yang berbahaya bagi umat Islam, sehingga beliau merasa perlu adanya refleksi ulang bentuk-bentuk hubungan Islam dan negara dalam Indonesia modern di masa mendatang. Puncaknya pidato beliau pada pertemuan halal-bihalal organisasi muda Islam, 3 Januari 1970. Kesimpulannya umat Islam tidak mempunyai

²⁴ Lihat hlm. 3.

²⁵ M. Deden Ridwan, *Gagasan Nurcholish Madjid; Neo Moderisme Islam dalam Wacana Tempo dan Kekuasaan*, cet.I (Yogyakarta: Belukar Budaya, 2002), hlm. 82.

²⁶ *Ibid.*

peluang lagi mendapat kekuatan politik, jika masih mengharapkannya melalui jalur partai politik yang bersifat praktis. Yang kemudian demi kepentingan perkembangan umat beliau menyerukan *Islam Yes, Partai Islam No!* sebuah seruan deislamisasi partai politik, melalui program yang disebut “sekulerisasi”, kemudian menjadi sebuah slogan pembaruan politik Islam di Indonesia²⁷.

Tumbangnya Orde Baru berakibat bermunculannya berbagai partai baru dengan aneka macam ideologi yang diusung. Peristiwa itu persis terjadi pada masa pemerintahan Soekarno, yang kemudian disadari bahwa penyebab berjamurnya partai politik itu adalah suasana kemerdekaan, sulitnya membendung euforia kebebasan. Padahal itu bisa jadi bumerang yang dapat menjauhkan bangsa ini dari kemashlahatan politik. Untuk mengurangi menjamurnya partai politik, Bung Karno menyarankan untuk memilih beberapa partai yang rasional, namun sayangnya beliau memasukkan komunis menjadi salah satu partai rasional di dalam pilihannya kala itu²⁸.

Sekarang setelah ‘kemerdekaan’ dari Orde Baru, bangsa ini diramaikan kembali dengan parpol, apakah ini euforia kebebasan juga? Entah itu apa, namun sekarang yang menjadi sorotan penulis ialah sensitifitas dari umat Islam terhadap politik yang sedang bergulir di negara ini. Mereka sangat enggan sekali mencampurkan kehidupan mereka dengan aktifitas politik tersebut, seolah-olah politik sebuah kegiatan di luar Islam, ini menjadi suatu

²⁷ M. Deden Ridwan, *Ibid*, hlm. 84.

²⁸ *Republika*, Rabu, 20 Juni 2001, hlm. 4.

kenyataan yang menyakitkan, terutama jika menyimak saat perjuangan para intelektual Islam pada kancah perpolitikan masa Orde Baru.

Menurut penulis benar apa kata Nurcholish Madjid, tidak mesti kita – umat Islam- memperoleh kekuasaan politik melalui parpol, masih banyak jalan lain untuk mendapatkannya. Di sini jangan dimaknai meninggalkan politik itu lebih baik atau dianjurkan, akan tetapi mencoba berpolitik bukan melalui sistem politik praktis yang banyak dimotori oleh partai. Masih banyak cara berpolitik yang tidak memandang partai sebagai sebuah syarat untuk legitimasi keislaman dalam pemerintahan. Penulis mengambil apa yang dikatakan Amien Rais, bahwa dalam definisi politik ada kekurangan mengenai mengapa kita harus berpolitik, disinilah seharusnya Islam menyempurnakan, dengan memberikan pengertian serta wawasan mengapa politik itu penting kita lakukan, sehingga ketika mereka dihadapkan terhadap politik tidak lagi menjadi bingung atau takut.

Maka kasus Pemilu Raya ini penulis pandang sebagai sebuah terobosan baru terhadap sikap politik jamaah Islam khususnya warga Jogokariyan. Penulis merasa tertarik untuk mengkaji kegiatan tersebut, dari segi dasar pemikiran, efektifitasnya sampai dampak yang berkemungkinan muncul dari kegiatan tersebut. Apakah ada kepentingan lain selain sosialisasi masjid? Atau bahkan akan menimbulkan ‘politisasi masjid’? Dapatkah kegiatan tersebut dijadikan sebagai salah satu pembelajaran demokrasi? Dan apakah mungkin lewat pengambilan contoh kegiatan tersebut diambil

kesimpulan bahwa masjid dapat berfungsi sebagai media pembelajaran berpolitik bagi masyarakat Islam?

Melalui kegiatan tersebut, diharapkan umat Islam sadar bahwa Islam itu sempurna, mengajarkan seluruh aspek kehidupan pada umatnya, termasuk politik. Yang kemudian kegiatan tersebut dapat dijadikan sarana untuk pembelajaran berdemokrasi terhadap jamaahnya. Sehingga jamaah masjid bisa mempelajari salah satu sistem politik, yang penulis yakin ini juga diharapkan oleh bangsa kita, rakyat Indonesia harus melek politik, bukan hanya mahasiswa rakyat Indonesia itu !, jadi melalui masjid mari kita benahi sikap perpolitikan umat Islam sekarang dan untuk masa yang akan datang.

C. Rumusan Masalah

1. Apakah pemilu raya takmir masjid Jogokariyan berjalan secara efektif?
2. Dapatkah konsep pemilu raya dijadikan sebagai pembelajaran berdemokrasi bagi masyarakat?
3. Apakah masjid dapat berfungsi dalam pembelajaran berpolitik bagi masyarakat?

D. Tujuan Penelitian

1. Menganalisa efektifitas pemilu raya
2. Identifikasi konsep pemilu raya sebagai pembelajaran berdemokrasi bagi masyarakat
3. Analisis konsep Fungsi Masjid Sebagai Media Pembelajaran Demokrasi

E. Kegunaan Penelitian

1. Penelitian ini sebagai tugas akhir dan syarat terpenuhinya perkuliahan pada jenjang strata satu.

F. Kerangka Teori

1. Fungsi Masjid sebagai tempat ibadah dan pusat kebudayaan

Maksud dan tujuan masjid sebenarnya terkandung dalam konsep adzan²⁹, yakni dalam kata “*حي على الصلاة*” dan “*حي على الفلاح*”, dua penggal ajakan tersebut sebenarnya menyiratkan bahwa sebenarnya masjid bukanlah tempat ibadah mahdhah semata, akan tetapi dengan asumsi Islam tidak mengajarkan sekulerisasi dunia dengan akhirat, maka Allah SWT memerintahkan mencari nafkah setelah selesai shalat. Melalui masjid dapat diusahakan bagaimana mendapatkan kebahagiaan atau kemenangan, baik itu duniawi maupun ukhrowi dengan cara yang Islami dan tidak merugikan sesama.

Muhammad Said Ramadhan Al-Buthy dalam bukunya Sirah Nabawiyah, sebagaimana disadur oleh Ahmad Yani³⁰:
“ tidak heran, jika masjid merupakan asas utama dan terpenting bagi pembentukan masyarakat Islam. Karena masyarakat muslim tidak akan tersentuh secara kokoh dan rapi kecuali dengan adanya komitmen terhadap sistem, aqidah dan tatanan Islam. Hal ini tidak akan dapat ditumbuhkan kecuali melalui semangat masjid (jilid II, hal. 6)”.

²⁹ Supriyanto Abdullah (ed.), *Peran dan Fungsi Masjid*, cet. I (Yogyakarta: Cahaya Hikmah, 2003), hlm. 3.

³⁰ Ahmad Yani, *Panduan Memakmurkan Masjid*, cet. III (Jakarta: Pustaka Tarbiyatuna, 2002), hlm. 2.

Masjid adalah dasar pembangunan Islam, sebagai barometer bagi perkembangan Islam, terlihat dalam fungsi ideal yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW³¹ ketika membangun masyarakat madani.

Islam dan kebudayaan tidak dapat dipisahkan, dengan dasar pemikiran Islam bukanlah agama sekuler yang memetakan sekaligus memisahkan antara yang profan dan yang sakral, bahkan sebaliknya.

Masjid adalah tempat ibadah dan pusat kebudayaan Islam, dan kebudayaan itu sendiri berarti hasil kegiatan dan penciptaan batin (akal budi) manusia seperti kepercayaan, kesenian, adat istiadat³², juga termasuk di dalamnya sistem sosial, serta politik kemasyarakatan. Nurcholish Madjid menguraikan kebudayaan dengan arti suatu hal yang mengunggulkan ikatan-ikatan peradaban –*Bond of Civility*-³³.

2. Konsep Pembelajaran Demokrasi

Pembelajaran bermakna suatu proses yang menyebabkan terjadinya kegiatan belajar. Sedang demokrasi adalah sistem politik yang diperintah oleh rakyat, bukan kalangan monarki atau aristokrat³⁴.

Jadi pembelajaran demokrasi adalah sebuah proses yang melibatkan dua unsur –pengajar dan pelajar- dengan target pencapaian sebuah kematangan pengetahuan mengenai ketatanegaraan atau

³¹ Mengenai fungsi masjid pada masa Rosulullah SAW, lihat, hlm. 5-6 tulisan ini.

³² Pusat Bahasa Depdiknas, *op. cit*, hlm. 170.

³³ Junaidi Idrus, *Rekonstruksi Pemikiran Nurcholish Madjid; Membangun visi dan Misi Baru Islam Indonesia*, cet I (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004), hlm. 57.

³⁴ Deden Faturohman & Wawan Sobari, *Pengantar Ilmu Politik*, cet. IV (Malang: UMM Press, 2004), hlm. 91

kenegaraan termasuk didalamnya pola pemerintahan yang tertumpu atau berasal dari rakyat.

Proses pembelajaran tersebut seharusnya memang berjalan seperti yang diharapkan, sehingga kita tidak merasakan kembali suasana pada pemilu legislatif tahun 2004 kemarin. Rakyat begitu terkesampingkan sementara para calon wakil mereka berusaha mati-matian untuk mendapatkan restu serta pengesahan ditengah ketersampingan masyarakat tersebut.

Pengetahuan demokrasi bukanlah pengetahuan yang harus diketahui oleh pihak yang di atas saja –pemerintah- akan tetapi rakyat sebagai unsur kedua dari pemilu harus pula mengerti, agar terjadi kesinambungan dalam pelaksanaan kenegaraan yang menjunjung tinggi nilai demokrasi. Demokrasi harus dipelajari sebagai sebuah pengetahuan yang tidak mutlak selamanya benar, selalu akan terjadi perubahan sesuai situasi dan kondisi di mana demokrasi tersebut diterapkan.

3. Konsep Pemilu Raya

Pemilu Raya adalah Pemilihan Takmir Masjid Jogokariyan yang bertujuan memilih ketua takmir yang kemudian membentuk kepengurusan takmir masjid sebagai pelayan sekaligus penggembala jamaahnya. Pemilihan ini mempunyai ciri visi misi “Dari Masjid Memakmurkan dan Mensejahterakan Umat” dengan target pemilih warga yang termasuk wilayah dakwah masjid Jogokariyan.

Pemilu ini merupakan langkah lanjutan dalam pensejahteraan umat. Para pengurus masjid menginginkan adanya sebuah pemerintahan umat yang terpusat di masjid. Melalui pemilu ini mereka berusaha memberikan sebuah pandangan baru terhadap fungsi masjid sebagai media pembelajaran politik bagi umatnya, salah satunya dengan mewujudkan pemerintahan umat yang didahului dengan adanya demokratisasi lewat pemilu raya.

Seperti halnya pemilihan umum yang lain, pemilu raya ini juga mempunyai prosedur dan teknik yang mencerminkan demokrasi yang seutuhnya, disesuaikan dengan nilai-nilai politik Islam yang telah digariskan dalam al-Quran.

Meskipun dalam Islam kata politik itu tidak ada, akan tetapi esensi politik sebagai sebuah pengetahuan mengenai ketatanegaraan serta pemerintahan umat banyak dibahas dalam Islam, dan kesempurnaan Islam tidak diragukan lagi, akan tetapi dalam setiap hal perlu adanya interpretasi ulang terhadap setiap kebudayaan Islam yang telah ada, karena dilihat dari manapun politik adalah budaya, sedang budaya adalah hasil karya pemikiran manusia yang dipengaruhi oleh situasi dan kondisi di sekelilingnya, maka sesuatu yang wajar jika kita melakukan pengkajian ulang terhadap setiap budaya manusia terdahulu.

Pemilu raya diilhami oleh adanya sebuah budaya organisasi masjid yang telah dilakukan oleh Rosulullah SAW ketika membangun kota Madinah. Rosulullah SAW disebut-sebut sebagai kepala

pemerintahan –negara- dan juga kepala agama –Nabiyullah-, yang mengatur serta melayani rakyatnya. Budaya inilah yang kemudian diinterpretasikan oleh para pengurus takmir masjid Jogokariyan, sebagai sebuah keharusan Islam untuk ikut andil dalam mengatur serta membangun negara. Namun situasi dan kondisi sekarang telah jauh berbeda dengan masa Rosulullah SAW, maka pemerintahan umat perlu dimaknai ulang, agar tidak melanggar aturan Islam yang lain yakni melakukan pelanggaran dengan membuat pemerintahan baru diatas pemerintahan sah, yang telah disetujui oleh bersama secara mufakat, itu termasuk makar, dan makar dilarang dalam Islam.

4. Masjid Sebagai Media Pembelajaran Berpolitik

Politik berarti (pengetahuan) mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan (seperti sistem pemerintahan, dasar pemerintahan)³⁵. Menurut Harold Lasswell, sebagaimana yang disebutkan oleh Amien Rais yakni kegiatan masyarakat yang berkisar pada masalah-masalah “siapa memperoleh apa, kapan dan bagaimana” (*who gets what, when, and how*)³⁶.

Dalam kepustakaan ilmu politik terdapat berbagai macam pendefinisian politik, pada umumnya dapat dikatakan bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik (atau negara) yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu. Usaha menentukan tujuan itu adalah pengambilan keputusan (*decision*

³⁵ EM Zulfajri & Ratu Aprillia, *op.cit*, hlm. 886

³⁶ Amien Rais, *Sukses & Keajaiban Kekuasaan*, cet III (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 39.

making) dengan menyeleksi antara beberapa alternatif dengan menyusun skala prioritas dari tujuan yang telah dipilih. Sedangkan dalam melaksanakan tujuan-tujuan terpilih tersebut diperlukan penentuan kebijakan-kebijakan umum (*public policies*) yang menyangkut pengaturan dan pembagian (*distribution*) atau alokasi dari sumber-sumber yang ada³⁷.

Politik selalu menyangkut tujuan-tujuan dari seluruh masyarakat³⁸, jadi politik bukan masalah tujuan seorang atau kepentingan segolongan orang tertentu. Dalam politik dikenal beberapa konsep pokok diantaranya: Negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijaksanaan dan pembagian atau alokasi³⁹. Dari kelima konsep pokok tersebut, makna politik dapat sekali berbeda-beda.

Menjadi media pembelajaran politik berarti menjadi sarana perantara untuk memahami Negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijaksanaan, dan pembagian atau alokasi sebagai inti dari pelajaran politik.

Masjid adalah sebuah bangunan yang menjadi tempat atau sentral kehidupan umat Islam⁴⁰. sebagaimana Rosulullah SAW telah mencontohkannya ketika beliau membangun dan membina negara Madinah beserta pembinaan kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijaksanaan dan pembagian atau alokasi yang terjadi di dalamnya. Sebagaimana kata imam Ibnu Taimiyyah rah.a., seperti yang disadur oleh

³⁷ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Cet. XX (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001), hlm. 8.

³⁸ *Ibid.*

³⁹ *Ibid*, hlm. 9

⁴⁰ Lihat hlm. 14 tulisan ini.

Supriyanto Abdullah, bahwa masjid didirikan sebagai tempat berkumpulnya penguasa dan rakyat tanpa dipisahkan jarak, sebagai tempat pembinaan takwa selain tempat ibadah mahdhoh yang telah lumrah. Masjid juga dijadikan tempat pembinaan politik, memutuskan kebijakan dan tempat menyelesaikan berbagai permasalahan⁴¹.

Gambaran fungsi masjid pada masa Rosulullah SAW diatas, sangat dapat ditemukan betapa potensialnya masjid terhadap pembinaan seluruh kehidupan umatnya. Menurut KH. M. Yusuf Hasyim bahwa dengan asas kemashlahatan umat, maka segala kegiatan yang berkepentingan untuk umat dapat dilaksanakan di masjid, termasuk praktek politik⁴².

Abu Bakar ra, dalam khotbah iftitah kekholidahannya mengatakan bahwa ketika umat Islam dilanda berbagai krisis maka masjid menjadi tempat kembali yang terbaik. Masjid sebagai institusi pemersatu dan penjernih jiwa umat Islam. *"Sesungguhnya rumah-rumah-Ku di bumi adalah masjid-masjid. Dan pengunjungnya adalah orang-orang yang memakmurkannya."* (HR. Abu Nu'aim)⁴³.

"Sesungguhnya masjid yang berdasar taqwa, pada hari mulai didirikan lebih patut engkau mendirikan shalat di dalamnya. Di dalamnya ada orang-orang yang ingin membersihkan diri. Dan Allah SWT menyukai orang-orang yang bersih." (Q.S. at-Taubah: 108). Dalam firman-Nya tersebut Allah SWT menganjurkan untuk dapat mempergunakan masjid sebagaimana mestinya, yakni sebagai tempat penyucian diri. Dengan ayat

⁴¹ Supriyanto Abdullah (ed), *op.cit*, hlm. 13

⁴² Republika, Jumat 9 Maret 2001, hlm. 4

⁴³ Buletin Idul Fitri Masjid Jogokariyan, edisi 9/1425 H, hlm. 15-16.

ini Allah SWT memerintahkan supaya dapat memakmurkan masjid yang telah dibangun dengan taqwa.

Namun tidak sembarangan orang yang dapat memakmurkan masjid. Dalam ayat 17 & 18 surat yang sama, mengatakan bahwa orang-orang musyrik tidak berhak memakmurkan masjid. Hanya orang-orang yang beriman kepada Allah SWT dan hari akhirat, orang-orang yang mengerjakan shalat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada siapapun kecuali kepada Allah SWT. Dengan memakmurkan masjid berdampak besar terhadap kehidupan umat Islam itu sendiri. Dengan makmurnya masjid Allah SWT akan melimpahkan rahmat dan keridloan-Nya serta syurga sebagai balasannya (Q.S at-Taubah: 21-22).

Salah satu manfaat kemakmuran masjid adalah masyarakat terhindar dari berbagai musibah, diantaranya kelaparan, wabah penyakit, ketimpangan sosial, kerusuhan massa, tindakan anarkhis, pemimpin zalim, penjajahan dan bentuk kefasadan yang lain, karena Allah SWT telah meridloi masyarakat yang telah memakmurkan masjid.

Bentuk memakmurkan masjid dapat dilakukan dengan mengikuti sunnah Rosulullah SAW yang telah banyak diriwayatkan oleh para perowi hadits, seperti wasiat beliau terhadap Abu Dzar: *"Hai Abu Dzar, Allah SWT telah berfirman: Sesungguhnya yang sangat Aku sayangi dari hamba-hamba-Ku ialah mereka yang rukun, berkasih sayang kepada-Ku, yang hati mereka selalu terkait di masjid, yang senantiasa membaca istighfar di waktu sahur (akhir malam) apabila Aku akan menurunkan*

siksa pada penduduk bumi dan teringat kepada mereka, maka Aku hindarkan siksa dari mereka.”⁴⁴

G. Telaah Pustaka

Dalam pencarian, penulis menemukan beberapa penelitian terhadap masalah masjid, seperti penelitian yang dilakukan oleh Gigin Budiano, NIM 88220165 dengan judul “Dakwah Islam Terhadap Remaja Masjid Desa Banjarsari Samigaluh Kulon Progo”, penelitian ini mendeskripsikan pelaksanaan dakwah Islam terhadap remaja masjid yang berada di desa Banjarsari tersebut.

Selain itu terdapat pula penelitian yang dilakukan oleh saudara Turimin dengan NIM 92211410, yang mengangkat judul “ Peranan Masjid Darussalam dalam Dakwah Islam di Desa Maguwoharjo Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Yogyakarta”. Tak jauh dari yang pertama penelitian ini bertujuan mengangkat sejauh mana peranan masjid dalam pengembangan dakwah Islam terhadap masyarakatnya.

Namun kedua-duanya belum merambah ke ranah pengembangan politik atau kemungkinan masjid sebagai media pembelajaran demokrasi bagi masyarakatnya, sebagaimana yang akan diteliti oleh penulis. Jadi, bisa dibilang penelitian ini merupakan langkah awal peninjauan terhadap potensi masjid bagi masyarakat Islam pada segi pembelajaran berpolitik.

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 16

H. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi, yang bersumber seluruhnya dari sebuah kejadian, kemudian ditarik ke dalam ruang wacana dengan memanfaatkan pisau bedah historis dan sosial, dengan kata lain proses pembuatan sebuah konsep berawal dari sebuah kejadian yang fenomenal, melalui bedahan historis serta penelusuran fakta yang telah terjadi melalui berbagai pustaka.

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Metode Penentuan Subyek dan Obyek

Dengan metode ini penulis menentukan bahwa yang menjadi Subyek Penelitian ialah Pengurus Takmir Masjid Jogokariyan, dan Obyek Penelitiannya ialah Pemilu Raya Takmir Masjid Periode 2004-2008.

2. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diharapkan, maka penulis menggunakan beberapa teknik diantaranya sebagai berikut:

a. Metode interview

Melalui metode ini penulis mendapatkan berbagai informasi terkait mengenai pemilu raya. Kegiatan interview dilakukan secara berkala dengan ketua Komisi Pemilihan Takmir Masjid Jogokariyan, Bapak Nur Hidayanto, S.Far.

Namun secara resminya interview dilakukan sebanyak dua kali, pertama dengan pihak KPT dan Pengurus Takmir Masjid –pada

tanggal 21 Mei 2005-, kemudian kedua bersama jamaah masjid Jogokariyan –pada tanggal 1 Juni 2005-. Metode ini dipakai dalam pengumpulan data sekaligus sebagai observasi atau validitas kebenaran tertulis dengan senyatanya. Observasi ini terpaksa dilaksanakan berbarengan dengan pengumpulan data, sebab data tertulis sangat minim dan tidak utuh.

Memang disini validitas kurang sekali, akan tetapi dikarenakan kekurangan arsip data, maka sangat sulit metode wawancara dijadikan sebagai sebuah observasi, namun observasi dilakukan dengan menguji data yang diterima atau didapat dari wawancara, oleh data mengenai kegiatan ini yang terdapat di beberapa surat kabar, untuk membuktikan kebenaran data-data yang diterima.

b. Metode Dokumentasi

Metode ini seharusnya yang paling pokok diharapkan serta dapat menghasilkan banyak data yang dapat membantu penulis. Namun di sini ada sedikit catatan, data yang didapat secara dokumentasi ini sedikit sekali yang berbentuk sebuah bundel dokumen, akan tetapi masih terpisah dan masih tersimpan pada tiap orang anggota KPT, sehingga metode ini kemudian hanya menjadi sebuah sampingan.

Penulis juga mendapatkan informasi dari berbagai kliping surat kabar dan majalah-majalah yang memuat berita mengenai pemilu raya takmir masjid Jogokariyan tersebut.

3. Metode Analisa Data

Dalam menganalisa data penulis menyinkronkan setiap data yang telah didapat dengan data yang datang sesudahnya, yaitu dengan melakukan interview secara berkala dengan pihak KPT dan Pengurus Takmir Masjid, maka kebenaran data dapat dipertanggungjawabkan.

Sejalan dengan itu penulis memilah dan memilih setiap data, memperkuat atau membuang data, sehingga akan mempermudah penulis dalam menyajikan data yang disusun untuk membangun sebuah kesimpulan.

Penyajian Data penulis tempatkan pada Bab II, Analisa Data pada Bab III, Analisis Konsep yang dibangun pada Bab VI, dan Kesimpulan pada Bab V.

BAB II

PEMILU RAYA TAKMIR MASJID JOGOKARIYAN

A. Sekilas Gambaran Umum Masjid Jogokariyan

Masjid Jogokariyan terletak di jalan Jogokariyan no. 36 Yogyakarta 55143. Bangunan berlantai dua ini dulunya hanya bangunan sederhana beratap joglo yang berdiri di lahan seluas 145 m² di kampung Jogokariyan itu. Dibangun pada tahun 1966, dengan ukuran 9x9 pada ruang utama tempat shalat dan 7x9 pada serambi. Resmi dipergunakan sejak tanggal 20 Agustus 1967, sampai sekarang telah mengalami tiga kali renovasi¹.

Renovasi pertama pada tahun 1978, dikarenakan tuntutan jumlah jamaah yang harus ditampung terutama jumlah jamaah jum'at dan ramadhan yang selalu membludak. Perluasan tersebut menggarap sayap selatan dan membangun serambi utara. Renovasi kedua pada tahun 1999, dengan alasan yang sama. Perluasan ini dilakukan dengan menggabungkan aula masjid menjadi bangunan yang sesuai dengan perkembangan jaman².

Renovasi tidak berhenti disana. Dengan kesepakatan jamaah, dibuatlah *masterplan* masjid Jogokariyan. Dengan mengikuti *masterplan* tersebut pembangunan masjid terus dilakukan hingga sekarang yang statusnya hampir selesai. Dana yang telah digunakan telah mencapai 1,7 Milyar yang seluruhnya merupakan partisipasi jamaah yang tergabung dalam program renovasi ini. Jamaah tersebut adalah yang tinggal di Jogokariyan, para alumni

¹ Tabloid Insani, edisi Januari 2005. hlm. 18.

² Buletin Idul Fitri Masjid Jogokariyan, edisi 9/ 1425 H. hlm. 10.

dan juga jamaah yang mempunyai ikatan dengan masjid namun berada di luar kampung Jogokariyan³.

Sekarang masjid Jogokariyan berlantai dua dengan ruang shalat utama yang beratap doom dan ruang tambahan untuk jamaah, termasuk dilantai dua. Masjid telah dilengkapi dengan menara, aula untuk berbagai kegiatan dengan satu perangkat komputer, ruang perpustakaan, dapur, ruang poliklinik, kamar mandi khusus wanita dan tempat wudlu.

Dari segi program kegiatan, masjid Jogokariyan mempunyai banyak program pelayanan yang variatif, disesuaikan dengan kebutuhan jamaah serta usia peserta yang dibidiknya, diantara pelayanan tersebut ialah:

- a. Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqoh (LAZIS)
- b. Poliklinik Kesehatan
- c. Donor Darah
- d. Pengajian:
 1. HAMAS (Himpunan Anak-Anak Masjid Jogokariyan)
 2. RMJ (Remaja Masjid Jogokariyan)
 3. UMIDA (Ibu-Ibu Muda)
 4. KURMA (Keluarga Alumni Remaja Masjid Jogokariyan)
 5. IKS (Ikatan Keluarga Sakinah)
 6. Ibu-Ibu Aisyiah
 7. FKMS (Forum Kajian Malam Selasa)

³ *Ibid.*

- e. KAUM (Komite Aksi Untuk Umat), pembagian sembako murah/gratis, dendeng sapi, khitanan, bea siswa, dan lain-lain.
- f. Layanan Perawatan Jenazah, termasuk ambulance Masjid Jogokariyan
- g. Layanan Pelaksanaan Ijab Qabul, Walimatul ‘Ursy dan Aqiqah
- h. Layanan Penginapan bagi Musafir (maksimal 3 hari)
- i. Perpustakaan Umum dan Modern⁴

Dengan kepengurusan Takmir Masjid yang berkesinambungan dipilih oleh jamaah sendiri, masjid Jogokariyan menjalankan visi misi mereka yang telah menjadi semangat tersendiri bagi pengurus takmir dan seluruh jamaahnya, yakni “Dari Masjid Memakmurkan dan Mensejahterakan Umat” dengan berpegang kepada al-Quran dan Sunnah Rosulullah SAW.

B. Dasar Pemikiran

Pemilu merupakan salah satu media apresiasi warga untuk mengapresiasi kepeduliannya kepada masjid⁵. Melalui pemilu raya dihurupkan ukun tumbuh kecintaan warga terhadap masjid dan syiar agama bisa lebih intensif lagi, dikarenakan jamaah masjid mengerti dan tahu lebih dekat terhadap fungsi masjid secara keseluruhan dalam kehidupan Islam⁶.

Visi masjid Jogokariyan secara lebih luas lagi sebenarnya ialah menjadikan peran serta fungsi masjid secara utuh sebagaimana yang telah

⁴ Selebaran KPT bekerja sama dengan LAZIS, lihat juga Buletin Idil Fitri edisi 9/ 1425 H. hlm. 35-39.

⁵ Kedaulatan Rakyat, *Pilih Takmir, Masjid Jogokariyan Pemilu*, Jum’at 17 Desember 2004/ 5 Dulkangidah 1973 Tahun LX No. 79

⁶ Kedaulatan Rakyat, *Meriah, Pemilu Takmir Masjid Jogokariyan*, Senin legi 20 Desember 2004/ 8 Dulkangidah 1973 Tahun LX No. 82.

dicontohkan oleh Rosulullah SAW⁷, sebenarnya cita-cita luhur ini yang menjadi alasan utama bagi takmir masjid Jogokariyan melaksanakan setiap kegiatan yang sifatnya melayani masyarakat⁸.

Dalam penjelasannya ketua KPT –Komisi Pemilihan Takmir-, Nur Hidayanto, S.Far., mengatakan ada beberapa tahapan dalam mewujudkan visi masjid Jogokariyan, langkah pertama ialah masjid harus memberikan sebuah pelayanan terhadap masyarakatnya, sehingga dengan pelayanan tersebut warga dapat secara fisik dekat dengan masjid. Ketika masyarakat telah dirasa dekat dengan masjid secara fisik, dilanjutkan dengan memberikan pemahaman mengenai dasar hukum memakmurkan masjid, yang masih terus disertai dengan pelayanan tadi. Kemudian langkah selanjutnya, menginformasikan tentang ada program apa saja di dalam masjid tersebut yang disediakan untuk melayani masyarakatnya.⁹

Dengan asumsi bahwa masjid akan secara optimal memenuhi fungsinya jika jamaah telah siap dan benar-benar dekat kepadanya, maka dengan pemilu raya ini diharapkan akan menjadi penyebab kedekatan jamaah kepada masjid.

C. Kepanitiaan

Dalam Pemilu Raya Takmir Masjid Jogokariyan, terdapat sebuah kepanitiaan pemilihan yang dinamai dengan KPT (Komisi Pemilihan Takmir).

⁷ Rosulullah SAW telah memfungsikan masjid bagi keberhasilan dakwah Islam, hampir seluruh kehidupan Islam ada di masjid,...selengkapnya lihat hlm. 5-6 tulisan ini.

⁸ Wawancara bersama Ketua Takmir masjid Jogokariyan, Bapak Muhammad Jazir ASP. Tanggal 21 Mei 2005.

⁹ Wawancara bersama ketua KPT masjid Jogokariyan, Bapak Nur Hidayanto, S.Far. Tanggal 21 Mei 2005.

Lembaga ini dibentuk dari hasil mandataris rapat rutin takmir masjid yang kemudian diberi hak untuk menyusun komisi dan segala perlengkapan Pemilu¹⁰.

Sebenarnya budaya pemakaian nama Komisi itu baru dipakai pada Pemilu Raya sekarang saja, mengikuti budaya pemilu legislatif, sebelumnya masih menggunakan kata Panitia Pemilihan Takmir, itu dipakai pada pemilu raya yang pertama pada tahun 1985 sampai pemilu yang keempat tahun 2000¹¹.

Dari data yang diterima¹², susunan kepanitiaan KPT terdiri dari:

Ketua : Nur Hidayanto, S.Far.
Sekretaris : Nawang Tri Indar Pramubekti
Bendahara : Amirudin Hamzah
Seksi-seksi :
Sie Humas : Aswoto, S.F.
Shodiq Agus Suryo Hadi
Iwan Arif Darmawan
Setiawan Budi
Sie Perlengkapan : Syubban Rizal Noor, S.Ag.
Sudiwahyono
Sie Acara : Wahyu Wijayanto, Amd.
Ismail Thoha Putra, S.H.

¹⁰KR, *Pilih Takmir,....op.cit.*

¹¹ Wawancara bersama ketua Takmir masjid Jogokariyan 2004-2008, Bapak Muhammad Jazir, ASP. Tanggal 21 Mei 2005.

¹² Data didapat dari Setiawan Budi.

Sie Pantarlih : Wahyu Widayat
 Anjang Noor Rahman
 Bambang Priambodo
 Sudirgohayu

D. Tema Kegiatan

Tema yang diusung dalam kegiatan Pemilu Raya ini ialah “Dari Masjid Memakmurkan dan Mensejahterakan Umat”, ini juga sebenarnya menjadi visi dan misi bagi masjid Jogokariyan, sampai akhirnya tercetus kegiatan Pemilu Raya ini¹³.

Tema tersebut tiada lain dimaksudkan bahwa visi misi masjid Jogokariyan mencita-citakan, dengan memakmurkan masjid dapat menjadikan masyarakat makmur sejahtera. Jadi peran dan fungsi masjid benar-benar terwujud seperti pada jaman Rosulullah SAW¹⁴.

E. Tujuan Kegiatan

a. Tujuan Pokok

Dari penamaan kegiatan ini, telah terdapat tujuan yang jelas yakni memilih ketua takmir masjid yang selanjutnya memimpin kepengurusan takmir masjid yang baru, guna mewujudkan visi misi masjid Jogokariyan¹⁵.

¹³ Bernas Jogja, *Ketua Takmir Masjid Jogokariyan Dipilih*, Rabu Pon 22 Desember 2004; Kedaulatan Rakyat, *HM Jazir ASP Ketua Takmir Masjid Jogokariyan*, Rabu Pon 22 Desember 2004/ 10 Dulkangidah 1973 Tahun LX No. 84.

¹⁴ Wawancara bersama ketua KPT masjid Jogokariyan, Bapak Nur Hidayanto, S.Far., Tanggal 21 Mei 2005.

¹⁵ KR, *Pilih Takmir....*, *op.cit.*

b. Tujuan Sekunder

Di balik pemilihan tersebut ada beberapa tujuan yang sekaligus ingin dicapai oleh pengurus takmir masjid diantaranya, ingin menumbuhkan rasa kecintaan masyarakatnya kepada masjid¹⁶.

Sebelum pelaksanaannya pengurus takmir masjid melakukan pendataan (sensus) jamaah pemilik hak pilih¹⁷, bertujuan untuk mendata calon pemilih juga untuk menambah database masjid, ketika itu pula sie Pantarlih membagikan undangan pemilu sebanyak 1.750 buah undangan. Dalam tema kegiatan ini pun tergambar sebuah misi yang diemban oleh masjid Jogokariyan, memakmurkan serta mensejahterakan umat¹⁸.

F. Gambaran Pelaksanaan Kegiatan

a. Hari/Tanggal Pelaksanaan

Pemilu Raya ini dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2004, yang dimulai pukul 08.30 WIB sampai dengan pukul 20.30 WIB¹⁹.

Sebelum pelaksanaan Pemilu tersebut, sebagaimana pemilu legislatif diadakan kampanye terlebih dahulu, di sana dijadikan ajang bagi para calon untuk memaparkan visi misi mereka. Kegiatan tersebut dilaksanakan dari tanggal 13 sampai 16 Desember 2004. Masa kampanye

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Bernas Jogja, *Ketua Takmir Masjid Jogokariyan Dipilih*, Rabu Pon 22 Desember 2004; *Kedaulatan Rakyat*, *HM Jazir ASP Ketua Takmir Masjid Jogokariyan*, Rabu Pon 22 Desember 2004/ 10 Dulkangidah 1973 Tahun LX No. 84.

¹⁹ *Ibid.*

itu juga dibarengi dengan kebiasaan menempel gambar-gambar kampanye para calon ketua takmir yang ditempel di berbagai sudut kampung²⁰.

Untuk lebih lengkapnya dibawah ini disebutkan pelaksanaan agenda KPT:

- a. Pendaftaran Calon Ketua Takmir 25 November-2 Desember 2005
- b. Seleksi Kandidat 3 Desember-5 Desember 2005
- c. Sosialisasi Kandidat Terseleksi 6 Desember – 12 Desember 2005
- d. Masa Kampanye Kandidat 13 Desember-16 Desember 2005
- e. Hari Tenang 17 Desember-18 Desember 2005
- f. Coblosan Calon Kandidat Ketua Takmir
Hari Ahad, 19 Desember 2005
Pukul 08.00 – 19.00 WIB.
- g. Penghitungan 19 Desember 2005, Pkl. 20.00 WIB.
- h. Pelantikan Pengurus Baru Baru Takmir masjid Jogokariyan periode 2004 – 2008, dilaksanakan pada acara Pengajian Pamitan Haji Jamaah Masjid Jogokariyan.²¹

Mengenai calon ketua takmir itu sendiri akhirnya didapat sebanyak 5 orang calon, yaitu :

- a. Harmaji Suwarno
- b. H Muhammad Jazir, Asp
- c. Muhammad Huda Probo Tejo Kusumo
- d. Nukman Gunadi, M.A

²⁰ Bernas Jogja, *Ketua Takmir... op.cit.*

²¹ Selebaran Pemilu Raya yang dikeluarkan oleh KPT bekerja sama dengan Lembaga Amil Zakat, Infaq, Shodaqoh (LAZIS) masjid Jogokariyan.

e. Suharyanto, S.E

Kelima calon tersebut telah dapat memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh KPT, diantaranya:

- a) Muslim – Laki-laki
- b) Sehat akal
- c) Berusia maksimal 55 tahun
- d) Jamaah masjid Jogokariyan
- e) Mempunyai KTP Jogokariyan
- f) Lolos verifikasi dari KPT, yakni:
 - Bisa baca al-Quran dengan fasih
 - Sanggup memakmurkan masjid
 - Bukan pengurus parpol atau bersedia mengundurkan diri
 - Bukan ketua RW dan ketua ortom masjid Jogokariyan atau bersedia mengundurkan diri
 - Didukung dan dicalonkan minimal oleh 10 orang²²

Proses pemilihannya, warga yang berhak, diberi hak untuk memilih 2 kandidat calon, tidak boleh lebih atau kurang, ini disebabkan agar calon yang bukan berasal dari tokoh masyarakat juga mendapatkan suara, sehingga perolehan suara bisa berimbang dan tidak ada perbedaan yang mencolok²³.

Menurut ketua KPT, Pak Nur, KPT merasa kaget ketika pada hari “H”nya jumlah pemilih membludak sampai melebihi target, sampai-

²² Kedaulatan Rakyat, *Tak Kalah Dengan Pilkades*, Sabtu Wage 18 Desember 2004/ 6 Dulkangidah 1973 Tahun LX No. 80.

²³ KR, *Meriah, Pemilu....op.cit.*

sampai acara doorprice berubah dari rencana dan sangat keteteran, gara-gara warga sangat antusias untuk memberikan partisipasinya dalam pemilu raya kali ini.²⁴

Di akhir kegiatan pemilu raya ini diketahui serta ditetapkan ketua takmir masjid Jogokariyan periode 2004 - 2008 ialah HM Jazir, dengan mengantongi 911 suara mengungguli calon yang lain, Suharyanto (373 suara), Harmaji Suwarno (311 suara), M Huda Projo Tejo Kusumo (205 suara) dan Nukman Gunadi (189 suara). Kemudian kandidat suara terbanyak ditetapkan sebagai ketua takmir dan kandidat yang memperoleh suara terbanyak kedua serta ketiga, dibantu ketua KPT dan satu wakil pengurus takmir masjid demisioner, membentuk sebuah formatur dan menyusun kepengurusan takmir²⁵.

Pada minggu malam, 19 Desember 2004, sekitar pukul 20.30 WIB ketua takmir masjid yang baru dilantik. Acara tersebut dihadiri 1000 warga, pada malam itu juga bertepatan dengan Pengajian Pamitan 14 Calon Haji Masjid Jogokariyan²⁶.

b. Target Jumlah Pemilih

Persyaratan untuk menjadi seorang pemilih yang dikriteriakan oleh KPT ialah:

- a) Muslim – sehat akal
- b) Berusia 16 tahun ke atas atau sudah menikah

²⁴ Wawancara bersama ketua KPT masjid Jogokariyan, Bapak Nur Hidayanto, S.Far. Tanggal 21 Mei 2005.

²⁵ Bernas Jogja, *Takmir Masjid Jogokariyan*, Rabu 22 Desember 2004/ 10 Dzulqa'idah 1425 H.

²⁶ *Ibid.*

c) Warga masyarakat Jogokariyan atau ber-KTP Jogokariyan.

Masyarakat sekitar masjid Jogokariyan tercatat ada sekitar 2000 orang yang mempunyai hak pilih, dari jumlah tersebut kepengurusan takmir masjid menargetkan 1000 pemilih yang mau menggunakan hak suaranya²⁷.

c. Jumlah Pemilih yang Hadir dan Tidak Hadir

Dari target yang diketahui sebanyak 1000 orang pemilih, tercatat sekitar 1.038 warga yang hadir dan menggunakan hak pilihnya. Dengan perhitungan akhir 999 buah surat suara yang sah dan 39 surat suara yang tidak sah. Jika dihitung dari jumlah seluruh undangan yang dibagikan sebanyak 1.750, berarti ada 712 warga yang tidak menghadiri undangan tersebut, namun telah melebihi target yang ditentukan²⁸.

Kehadiran warga tersebut tidak lepas dari usaha para panitia KPT yang sebelum kegiatan Pemilu Raya, dilaksanakan sebuah sensus data penduduk sekitar masjid Jogokariyan, yang tercatat kurang lebih ada sekitar 887 kepala keluarga²⁹.

G. Sumber Pendanaan

Menurut data sumber pendanaan pokoknya berasal dari kas bendahara takmir masjid yang kemudian ditambah dengan sumbangan atau partisipasi sukarela dari warga yang mampu.

Untuk dana sensus yang menjadi agenda KPT juga, sumber dana diambil dari kas bendahara takmir masjid. Kegiatan ini menghabiskan dana

²⁷ Bernas Jogja, *Ketua Takmir...op.cit.*

²⁸ *Ibid.*

²⁹ KR, *Tak Kalah Dengan....op.cit.*

sekitar Rp. 450.000,- dengan perincian biaya Rp. 25.000,- setiap RT-nya³⁰. Dana tersebut sebagai dana kompensasi bagi petugas sensus, yang diambil dari tiap RT.

Untuk lebih jelasnya dibawah ada laporan yang kami terima dari bendahara KPT, Bapak Amiruddin Hamzah:

NO	Tanggal Penerimaan dari Takmir	Jumlah
1	5 November 2004	Rp. 100.000,-
2	30 November 2004	Rp. 500.000,-
3	10 Desember 2004	Rp. 300.000,-
4	10 Desember 2004	Rp. 700.000,-
5	17 Desember 2004	Rp. 600.000,-

Jadi seluruh biaya –berjumlah Rp. 2.200.000,-- semuanya berasal dari kas takmir, karena menurut Bapak Sudiwahyono, bahwa kegiatan ini murni diselenggarakan oleh takmir masjid, maka biayanya juga murni dari pihak takmir. Untuk rincian penyaluran dana ke tiap-tiap seksi bisa dilihat dibawah ini:

³⁰ Wawancara bersama ketua KPT masjid Jogokariyan, Bapak Nur Hidayanto, S.Far. Tanggal 21 Mei 2005.

NO	TANGGAL PENERIMAAN	NAMA PENERIMA	SEKSI	JUMLAH
1	-	Sudiwahyono	Perlengkapan	Rp. 55.000,-
2	-	Rapat-rapat	Bendahara	Rp. 200.000,-
3	-	M Fani R	-“-	Rp. 120.000,-
4	-	NurHadiyanto	-“-	Rp. 90.000,-
5	-	-	Humas	Rp. 17.700,-
6	8 Desember 2004	Aswoto	Pantarliah	Rp. 300.000,-
7	9 Desember 2004	Wahyu H	-“-	Rp. 300.000,-
8	-“-	Sodiq ash	Humas	Rp. 300.000,-
9	10 Desember 2004	Sodik	-“-	Rp. 300.000,-
10	12 Desember 2004	Kanang	Sekretariat	Rp. 150.000,-
11	17 Desember 2004	Ismail Toha	Acara	Rp. 300.000,-
12	-“-	Sudiwahyono	Sekretariat	Rp. 25.000,-
13	18 Desember	Diwan	Pantarliah	Rp. 30.000,-
			JUMLAH	Rp. 2.172.700,-

H. Fasilitas Dan Sarana Penunjang

Fasilitas dan sarana penunjang dalam kegiatan Pemilu Raya tersebut diantaranya ialah, tiga bilik suara dengan 1.750 buah surat suara yang disediakan, serta banyaknya acara pendukung seperti pasar murah, pemeriksaan kir mata dan golongan darah secara gratis, juga ada pembagian sembako bagi 168 warga pra sejahtera³¹.

³¹ Bernas Jogja, *Ketua Takmir....op.cit.*

Acara pendukung tersebut dilaksanakan ketika pemilihan sedang berlangsung yakni bertempat disekitar TPS (tempat pemungutan suara)³², dana acara serta barang-barang yang disediakan berasal dari bantuan sukrela warga yang mampu.

Dalam kegiatan pemilu raya ini juga diadakan doorprice berupa 14 buah Radio Palito, 2 buah Radio Sun Rise, 5 kacamata cantik, 10 jam dinding, 5 voucer Soto Pono, 6 kalender Pro-U, dan terakhir 1 buah Televisi IDATA. Pengundian doorprice ini dilakukan setelah penghitungan suara yakni pada acara Pengajian Pamitan Calon Haji Masjid Jogokariyan yang bertempat di halaman masjid³³.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

³² KR, *Meriah, Pemilu....op.cit.*

³³ Bernas Jogja, *Takmir Masjid....op.cit.*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB III

ANALISIS DATA

A. Efektifitas Kegiatan Pemilu Raya

Imam Ibnu Taimiyyah rah.a., berkata “Tempat yang biasa digunakan untuk berkumpul para penguasa dan rakyatnya adalah masjid. Sedangkan Nabi SAW telah mendirikan masjid untuk membina ketakwaan, sebagai tempat untuk melakukan amalan dalam bentuk shalat, membaca al-Quran, dzikrullah, belajar dan mengajar hukum-hukum Islam, dan ceramah-ceramah tentang Islam diberikan di tempat ini. Di sisi lain, politik dalam bentuk mengangkat pemerintah, memutuskan dan menyelesaikan berbagai permasalahan juga diselesaikan di sini, dan umat Islam berkumpul di masjid untuk membicarakan dan menyelenggarakan berbagai amalan agama”¹.

Supardi & Teuku Amiruddin mengatakan masjid itu sebagai sarana yang dibutuhkan untuk mendidik manusia supaya jadi benar dan bertakwa². Keduanya mengambil contoh kepada pemerintah Daulah Islamiyah yang pertama pada periode Rosulullah SAW di Madinah. Macam fungsi sarana tersebut diantaranya seperti ditulis oleh Ahmad Yani dalam bukunya³, yakni mencakup:

- a. Sarana Pembina Iman
- b. Sarana Pembina Masyarakat Islami
- c. Sarana Pengokoh Ukhuwah Islamiyah

¹ Supriyanto Abdullah (ed.), *op.cit*, hlm. 13.

² Supardi & Teuku Amiruddin, *Manajemen Masjid Dalam Pembangunan Masyarakat; Optimalisasi Peran & Fungsi Masjid*, cet I (Yogyakarta: UII Press, 2001), hlm. 2.

³ Ahmad Yani, *op.cit*, hlm. 3 – 9.

d. Sarana Perjuangan

e. Sarana Tarbiyah

Sedangkan Sidi Gazalba mengatakan mahkamah adalah lembaga politik yang bertugas mempertahankan berlakunya hukum dan menjaga supaya ia tidak dilanggar, dan kalau dilanggar mengakibatkan adanya sanksi bagi si pelanggar. Soal-soal peradilan diselesaikan di masjid pada zaman Nabi SAW (Bukhori 8: 44; 98: 18)⁴. Beliau juga menambahkan dengan melakukan sidang peradilan di masjid akan menghilangkan subjektifitas pertimbangan dan digantikan dengan objektifitas hukum dan susila Islam.

Dari ketiga penggambaran diatas, masjid adalah jantung kehidupan bagi umat Islam, pusat kebudayaan di samping tempat ibadah secara mahdhah bagi umatnya. Namun untuk mewujudkan peran dan fungsi masjid tersebut tidaklah mudah, pada jaman sekarang ini, diperlukan manajemen yang mantap untuk mengatur setiap aspek serta perangkat kemasjidan. Diperlukan kematangan program serta pendukung atau pelaksana dan rasa loyalitas berpartisipasi tinggi pada niat yang agung ini.

Banyak sekarang masjid yang bermanajemen kurang mantap, sehingga ada masjid yang kegemukan dana dan tumbuh dengan kegiatan yang tidak jelas target marketnya, sedang lainnya tak sedikit pula yang notabene progresif kegiatannya dalam membangun *shaft kultural*, namun hidup kembang kempis karena kekurangan dana⁵.

⁴ Sidi Gazalba, *op.cit*, hlm. 201.

⁵ Supardi & Teuku Amiruddin, *op.cit*, hlm. xi.

Dari sana dapat kiranya kita pertanyakan ada apa sebenarnya ini? Ini adalah masalah ke-masjid-an yang patut kita ketahui dan kita cari solusinya.

Secara garis besar, krisis masjid⁶ itu dapat dikategorikan ke dalam:

a. Krisis Kepengurusan

Syarat pertama pemakmuran masjid ialah solidnya kepengurusan takmir masjid. Krisis kepengurusan biasanya timbul dikarenakan:

- a) Komitmen dan tanggung jawab pengurus yang rendah.
- b) Ada pengurus yang tidak mengerti tentang bagaimana menjalankan roda kepengurusan
- c) Tidak ada uraian kerja pengurus dan wewenang yang jelas.
- d) Waktu, tenaga dan pikiran serta perhatian pengurus yang kurang sehingga kepengurusan berjalan sambil lalu saja.
- e) Terdapat konflik atau ketidakcocokan pribadi antara pengurus yang satu dengan yang lain, serta masih banyak lagi.

Akibatnya seksi-seksi kurang berfungsi, pelaksanaan program-program masjid hanya tertumpu pada satu atau dua orang saja, aktifitas kurang serta tidak ada variasi dan akhirnya akibat yang terbesar ialah tidak dipercayai umat alias ditinggalkan oleh jamaah.

b. Krisis Khatib

Khatib mempunyai peran penting dalam pembinaan serta peningkatan kemakmuran masjid. Seorang khatib mempunyai tugas penting dalam pembinaan umat, lewat dakwah yang diberikannya, khatib

⁶ Ahmad Yani, *op.cit*, hlm.109 – 114.

yang pandai mengambil tema khutbah yang menarik dapat menjadi daya tarik tersendiri untuk menjadikan jamaah lebih bersemangat datang ke masjid.

Dengan tanggung jawab itu diharuskan bagi masjid untuk mempunyai khatib bukan hanya kapasitasnya yang memadai, namun juga kualitasnya harus jempolan sehingga jamaah menjadi antusias saat mengikuti setiap khutbah, baik kala jumatan atau khutbah pembinaan lainnya.

c. Krisis Remaja Masjid

Remaja adalah tulang punggung dalam upaya pemakmuran masjid, sedangkan banyak kasus terjadi masa remaja adalah masa anak beranjak dewasa, rawan sekali dengan pengaruh-pengaruh kenakalan remaja. Dalam hal ini diperlukan suatu program atau organisasi yang dapat menampung serta dapat memenuhi kepentingan remaja. Mereka harus dibedakan dengan usia anak-anak, sehingga mereka tidak merasa diasingkan atau diterlantarkan. Pembinaan harus ditekankan terhadap masalah pergaulan hidup serta pengetahuan mengenai kerasnya kehidupan dunia, sehingga mereka lebih siap untuk menjadi generasi penerus bangsa.

d. Krisis Keterlibatan Jamaah

Bagaimana caranya agar keterlibatan jamaah begitu konstan pada setiap acara di masjid, jangan sampai jamaah datang banyak secara insidental, hanya ketika ada acara hari kebesaran Islam misalnya, sedangkan diluar itu mereka tidak mau tahu dengan kegiatan masjid.

perpecahan akibat partai politik⁸. Fungsi masjid sekarang perlahan-lahan mulai lenyap dan pengkhususan masalah ukhrowi pada masjid, itu sebenarnya telah menyalahi sunnah Rosulullah SAW. Sedangkan mengenai perpecahan partai politik, terutama dalam pengangkatan imam (pemimpin), sangat dapat dimengerti bahwa politik adalah budaya manusia yang telah sangat kultural sekali, dan perpecahan yang diakibatkan olehnya bersifat aktif, tidak seperti halnya perpecahan akibat madzhab⁹. Menurutnya partai-partai tersebut baru tidak akan mengakibatkan pecahnya umat jika dihasilkan melalui ijtihad.

Dari pemaparan diatas, tergambar betapa perwujudan peran dan fungsi masjid layaknya ketika masa Rosulullah SAW itu sangat memerlukan kerja otot dan juga otak, sehingga tak benar jika ada yang mengatakan masjid dipandang makmur dengan banyaknya shodaqoh serta zakat dan juga hewan qurban yang melimpah, dengan masjid selalu saja terasa meluas setiap kali shalat berjamaah.

Mengingat suatu yang sangat penting bagi terwujudnya kemakmuran masjid itu adalah aspek dari dalam yakni pengurus takmir masjid, maka memilih kepengurusan haruslah sungguh-sungguh, sehingga tidak terjadi kemandulan program serta hilangnya para jamaah, dikarenakan ketidak jelasan program serta kaburnya target yang akan dituju.

Pemilu Raya Takmir Masjid yang dilakukan oleh kepengurusan takmir masjid Jogokariyan adalah merupakan sebuah kegiatan yang ingin mengoptimalkan potensi masjid sebagaimana yang telah difungsikan pada

⁸ Sidi Gazalba, *op.cit*, hlm.319-338.

⁹ *Ibid*, hlm. 327.

jaman Rosulullah SAW. Sebagaimana dasar pemikiran dari kegiatan ini, maka itu pula yang menjadi tujuan kegiatan pemilu raya.

Menurut data yang telah diterima¹⁰, pemilu raya ini telah dapat mengundang warga Jogokariyan untuk lebih mendekatkan diri secara fisik sekaligus ruhani terhadap masjid. Dalam upaya menanggulangi krisis kepengurusan, masjid ini mengadakan pemilihan takmir yang telah dilaksanakan sebanyak lima kali dengan yang sekarang. Namun ada sedikit pemaksimalan secara 'politik' dalam pemilihan takmir yang sekarang ini, yakni kepengurusan takmir masjid mencoba meng-upgrade kegiatan pemilihan yang dahulunya hanya terlihat biasa-biasa, dengan kerja keras akhirnya dapat menembus target pemilih, mencapai 59,3% dari jumlah surat suara yang dibuat.

Efektifitas dan efisiensi ukurannya bukan terhadap laba atau untung yang didapat dari kegiatan tersebut, akan tetapi suatu prinsip dasar bahwa dengan sumber daya (dana & keahlian) yang terbatas¹¹, mampu menciptakan atau menyukseskan pemilu raya tersebut. Efektifitas itu dapat dipertimbangkan dengan menganalisis kedua sumber daya tersebut, sehingga tujuan dari pemilu raya ini dapat tercapai.

a. Tentang Kepanitiaan

Bahasa Komisi Pemilihan Takmir –selanjutnya disebut KPT- sebenarnya mengekor terhadap budaya Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada pemilu legislatif. Lembaga ini dibentuk berdasarkan mandataris rapat

¹⁰ Lihat hlm. 30-31.

¹¹ Supardi & Teuku Amiruddin, *op.cit*, hlm. 24.

rutin masjid Jogokariyan, yang lantas bertanggung jawab melaporkan kegiatannya langsung kepada umat, yang tentu saja pertanggung jawaban terhadap Allah SWT telah menjiwai setiap diri para anggota KPT.

Disana tergambar adanya pelaksanaan terhadap administrasi politik Islam, yang berasaskan musyawarah, sebagai kekuasaan tinggi. Serta adanya pertanggung jawaban langsung terhadap jamaah, sebagai sebuah keharusan administrasi politik Islam yang berasaskan segala amal perbuatan haruslah diniatkan untuk mencapai keridhoan Allah SWT semata. Inilah sebuah usaha politik pada tingkat awal kenegaraan, yang menurut al-Farabi politik itu dimulai dengan pembahasan mengenai asal usul masyarakat, sekaligus sebagai cikal bakal terbentuknya negara¹².

Di sini terdapat dua lembaga lain –yakni rapat rutin masjid dan jamaah masjid- yang melahirkan serta yang mengontrol secara tidak langsung kinerja KPT. Perlu diketahui rapat rutin masjid Jogokariyan dilakukan secara rutin tiap jumat kliwon sesudah shalat jumat, dan uniknya rapat ini tidak membatasi makna umat dalam peserta rapat, siapapun boleh mengikuti rapat tersebut, sekalipun itu jamaah yang hanya menumpang shalat jumat saja¹³. Pengurus takmir masjid berusaha semaksimal mungkin untuk terbuka kepada jamaah, sebab hakekatnya ada kepengurusan takmir itu tiada lain adalah adanya pelayan bagi jamaah masjid, sehingga jamaah yang datang ke masjid akan terpenuhi kebutuhannya.

¹² Nanang Tahqiq (ed.), *Politik Islam*, cet. 1 (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 6.

¹³ Wawancara bersama ketua Takmir masjid Jogokariyan periode 2004 – 2008, Bapak Muhammad Jazir, ASP. Tanggal 21 Mei 2005.

Komisi Pemilihan Takmir memiliki tugas menyusun komisi serta segala perlengkapan pemilu. Jadi KPT berkewajiban mengatur, mengawasi serta mengusahakan agar pemilu berjalan tertib, fair, transparan dan santun. Tugas ini kemudian melahirkan berbagai trik untuk mensukseskan pemilu raya dengan cara menarik perhatian warga agar datang dan bisa ikut berpartisipasi dalam pemilihan takmir tersebut.

Dalam kinerjanya KPT tetap menggunakan politik pelayanan terhadap masyarakat, yakni bagaimana agar masyarakat merasa dilayani dan terpenuhi kebutuhannya (*Needs*). “Dalam memberikan pemahaman – mengenai program serta cita-cita masjid- terhadap masyarakat tidak boleh dilepaskan politik pelayanan ini”, demikian kata ketua KPT¹⁴.

Dalam menentukan kriteria calon (bakal calon) ketua takmir masjid, KPT berusaha menerapkan politik kepemimpinan Islam. Syarat yang mereka ajukan dalam verifikasi calon ketua takmir sangatlah menggambarkan semangat Islam yang tinggi, namun secara serempak mereka menolak adanya campur tangan ‘politik’ dalam pemilu tersebut. Politik yang bagaimana?

Sebagaimana makna politik dalam Islam itulah yang mereka pegangi yakni pembentukan kekuasaan untuk mengatur sosial dan ekonomi menurut keyakinan –al-Quran & Sunnah-, yang jika kemudian keyakinan tidak dapat menyelesaikan masalah, bukan ideologi yang dipakai akan

¹⁴ Wawancara bersama ketua KPT masjid Jogokariyan, Bapak Nur Hidayanto, S.Far., tanggal 21 Mei 2005.

tetapi ijtihadlah yang dipergunakan¹⁵. Pada masa Rosulullah SAW, terbentuknya politik itu bertujuan untuk mengatur masyarakat muslim yang makin luas, maka Rosulullah SAW disana membentuk sebuah Negara Islam yang pertama. Dari pada itu politik Islam juga menghancurkan lawan yang menyerang. Maka fungsi politik Islam pada waktu itu mengatur ke dalam, menundukan tantangan dari luar¹⁶.

Maka yang mereka –pengurus takmir- tolak adalah politik yang diluar politik Islam, walaupun penjaminan tidak ada, yang ada hanya usaha pencegahan semaksimal mungkin, sehingga cita-cita masjid Jogokariyan dapat tercapai.

Dalam proses pencoblosan ada hal yang menarik yakni warga yang berhak pilih diharuskan mencoblos 2 kandidat calon ketua takmir masjid, ini bertujuan untuk meratakan hasil perhitungan disebabkan adanya salah satu kandidat yang paling kuat sehingga dikhawatirkan perolehan suara tidak berimbang.

Ini sebuah terobosan yang bagus dalam pembelajaran politik terhadap masyarakatnya. Masyarakat diberi kebebasan untuk memilih kandidat secara personal dan juga secara kerjasama tim sehingga kecocokan pasangan bukan ditentukan oleh KPT, namun langsung menurut pandangan masing-masing masyarakat. Namun dalam administrasi politik ini kurang efektif, sebab kenapa?. Jika seandainya telah ada calon kuat yang notabene disetujui oleh jamaah, maka kenapa

¹⁵ Sidi Gazalba, *op.cit*, hlm.194.

¹⁶ *Ibid*.

tidak aklamasi saja. Itu dilihat dari efisiensi, namun sekali lagi tujuan dari pada pemilu raya ini bukan hanya memilih ketua takmir, lebih dari itu pengurus takmir masjid mengharapkan jamaah lebih dekat dan mengenal lebih jauh peran serta fungsi masjid yang sebenarnya, dengan merujuk ke masa Rosulullah SAW¹⁷.

Dalam penentuan balon ketua takmir masjid, KPT merujuk kepada ketentuan politik Islam dalam konsep pemimpin (*imamah*). Seperti yang dikriteriakan oleh al-Farabi, pemimpin itu harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Ia harus memiliki organ–organ tubuh sempurna, bebas dari kekurangan
2. Ia harus memiliki pemahaman yang baik dalam menangkap segala sesuatu yang diutarakan kepadanya sesuai dengan maksud si pengutara
3. Ia harus memiliki memori atau ingatan baik dari segala sesuatu yang telah ia pahami, lihat atau dengarkan
4. Ia harus pandai, cerdas dan dapat menangkap indikasi paling halus sekalipun
5. Ia harus memiliki artikulasi baik sampai memungkinkannya menjelaskan dengan sempurna hal-hal dalam pikirannya
6. Ia harus mencintai pengetahuan dan belajar serta terbuka pikiran dan hatinya
7. Ia harus cinta kebenaran, dapat dipercaya, dan membenci kebatilan dan pendusta

¹⁷ Lihat hlm. 14

8. Ia tidak berhasrat besar atau berkecenderungan tinggi pada makanan, minuman, hubungan seksual, judi dan bersenang-senang
9. Ia harus bangga pada diri sendiri, mencintai kehormatan
10. Uang dan tujuan-tujuan dunia lainnya harus diminimalisasi
11. Ia harus secara alamiah mencintai keadilan, membenci penindasan dan ketidakadilan sekaligus mempraktekkannya.
12. Ia harus bersemangat dan kuat untuk melakukan segala sesuatu ketika kesadarannya memintanya tanpa rasa takut atau lemah akal¹⁸.

Sedangkan dalam bukunya Ahmad Yani menyebutkan pemimpin masjid itu sangat krusial sekali, sehingga seorang pemimpin masjid itu minimal harus memiliki tiga kriteria utama, yakni:

1. Kepribadian yang sholeh
2. Wawasan keislaman dan kemasyarakatan yang luas
3. Kemampuan manajerial yang baik¹⁹

Dengan data yang didapat mengenai kriteria yang dipersyaratkan oleh KPT²⁰, kedua belas syarat tersebut sebenarnya sangat berat sekali untuk dipenuhi. Namun KPT telah berusaha memenuhi syarat pertama dengan memperluas pengecualian kesempurnaan organ-organ tubuh secara fisik. Syarat kepintaran serta kecintaan terhadap ilmu KPT timbulkan pada syarat verifikasinya, yakni dapat membaca al-Quran secara fasih dan benar dan juga dengan adanya 'kontrak politik'-meminjam istilah tabloid insani- yakni sebuah kesepakatan sanggupnya seorang calon untuk memakmurkan

¹⁸ Nanang Tahqiq (ed.), *op.cit*, hlm. 11-12.

¹⁹ Ahmad Yani, *op.cit*, hlm. 107.

²⁰ Lihat hlm. 26-27.

masjid, ini juga dapat mewakili syarat nomor tiga yang dikategorikan oleh Ahmad Yani.

Komisi pemilihan Takmir berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi lembaga yang solid, namun tiada gading yang tak retak demikian pengakuan dari ketua KPT sendiri²¹. Dalam mengemban tugas KPT telah bersungguh-sungguh menyukai pemilu raya kali ini, tapi ada sedikit yang perlu dicatat, perihal bidang administrasi KPT serta sekretaris yang belum sempat menyusun laporan akhir kegiatan, sehingga data-data masih berserakan di mana-mana, padahal laporan tersebut bisa menjadi sebuah acuan untuk mengontrol keberhasilan sebuah kegiatan. Dan juga pengarsipan terhadap dokumen-dokumen tertulis adalah sesuatu yang penting dalam organisasi, demi menyimak dinamika kegiatan masjid selama ini²².

Mengenai hal ini ketua KPT sendiri mengakui memang belum dapat menyusun laporan akhir, soalnya ketika kegiatan pemilu raya ini berakhir, ada lagi kegiatan yang sama pentingnya, yakni pengiriman hewan qurban ke Aceh yang dilakukan sendiri oleh masjid Jogokariyan, dengan mengusung bendera masjid, jadi waktu dan perhatian langsung tersita ke kegiatan tersebut. Dan juga kami masih mencari sekretaris yang dapat diandalkan, dan sampai sekarang belum menemukannya²³.

²¹ Wawancara bersama ketua KPT masjid Jogokariyan, Bapak Nur Hidayanto, tanggal 21 Mei 2005.

²² Ahmad Yani, *op.cit*, hlm. 73

²³ *Ibid*.

b. Idealisme Tujuan Dengan Senyatanya

Esensi terpenting dari Pemilu Raya ini sebenarnya adalah memilih ketua takmir masjid Jogokariyan, guna melanjutkan tampuk pemerintahan sebelumnya, sehingga program-program masjid dapat dilaksanakan guna melayani umat.

Pentingnya pemimpin dalam masjid sangat berpengaruh terhadap kemakmuran masjid itu sendiri, yang perlu diperhatikan adalah memilih pemimpin adalah personilnya, untuk dapat melaksanakan program atau mencapai tujuan organisasi masjid²⁴ sebab sebaik apapun mekanisme dan sistem sangat tergantung sekali terhadap manusianya.

Dalam penataan Negara al-Farabi memposisikan pemimpin sebagai aspek pertama yang harus ada, bahkan beliau mengajukan syarat-syarat menjadi pemimpin yang olehnya dikatakan tak mungkin dipenuhi²⁵.

Demikian halnya pandangan para pengurus takmir masjid Jogokariyan, sehingga mereka benar-benar ingin mengoptimalkan seleksi atau pemilihan calon ketua takmir mereka, ini diwujudkan dengan dilaksanakannya pemilu raya yang demokratis, pemilihan kali ini dikemas sedemikian rupa dengan tujuan dapat menarik perhatian warga Jogokariyan sekaligus mengajak mereka untuk berpartisipasi di dalamnya.

Sebenarnya pemilu raya dilaksanakan berbeda dari yang sebelumnya ini lebih tepat sebagai sebuah langkah lanjutan dari manajemen masjid yang tengah dijalankan oleh para pengurus masjid.

²⁴ Supardi & Teuku Amiruddin, *op.cit*, hlm.27.

²⁵ Nanang Tahqiq (ed.), *op.cit*, hlm. 12-13.

Melalui tulisannya Muhammad Jazir (ketua takmir 2004 – 2008) menyebutkan ada lima tahapan manajemen masjid yang sedang diterapkan di masjid Jogokariyan, yakni:

1. Menentukan Wilayah Masjid

Maksudnya ialah masjid seharusnya menentukan cakupan wilayah dakwah yang akan digarapnya disesuaikan dengan situasi dan kondisi, peluang serta tantangan yang dihadapi. Setelah ditentukan lantas disosialisasikan kepada masyarakat pendukungnya sehingga terbangun rasa “handarbeni” terhadap masjid tersebut. Untuk sosialisasi ini diperlukan alasan-alasan logis dan tentu berdasarkan syariat kenapa mereka harus bergabung sebagai “ummat” masjid.

2. Melakukan Pendataan Jamaah Masjid

Ummat masjid baik itu ummat *ijabah* maupun ummat *dakwah*, adalah *stakeholders* masjid. Mereka adalah gembalaan dari para pengurus takmir masjid, maka gambaran mengenai potensi, tantangan, peluang dan hambatan wajib diketahui pengurus. Usaha ini diriilkan oleh pengurus takmir Jogokariyan melalui sensus data penduduk Jogokariyan yang telah ditentukan sebagai wilayah dakwah masjid Jogokariyan.

3. Merencanakan Kegiatan Masjid

Langkah selanjutnya setelah memiliki database masjid mengenai jamaah, dan telah diketahui potensi, peluang dan tantangan, maka akan dapat memudahkan merencanakan kegiatan masjid yang

dapat ditentukan menurut skala prioritas sesuai dengan tuntutan situasi dan kondisi riil jamaah.

4. Mensosialisasikan Kegiatan Masjid

Untuk menjaga keterikatan jamaah dengan masjid maka seluruh program kegiatan masjid hendaknya disosialisasikan dengan sebaik-baiknya, sehingga kegiatan masjid itu seakan menjadi bagian dari kehidupan keseharian umat. Masjid Jogokariyan telah mengeluarkan buletin idul fitri yang sekarang telah mencapai 9 edisi. Didalamnya memuat informasi mengenai program serta sosialisasi laporan keuangan, zakat shodaqoh di samping tulisan-tulisan keagamaan, ada juga kolom ucapan selamat hari raya idul fitri.

5. Membuat Laporan Kegiatan Masjid

Setiap kegiatan masjid selesai dilakukan, hendaknya pengurus segera membuat laporan yang transparan, komunikatif dan memberi motivasi keterlibatan bagi kegiatan-kegiatan di masa-masa yang akan datang²⁶.

Pemilu raya ini dilaksanakan setelah sensus, sekaligus pada acara tersebut disosialisasikan setiap rencana kegiatan yang sebenarnya telah rutin diselenggarakan, akan tetapi ketika itu banyak warga 'baru' yang datang untuk berpartisipasi dalam pemilu, sehingga publikasi program kegiatan masjid saat itu adalah tepat.

²⁶ Tulisan Muhammad Jazir (ketua takmir masjid Jogokariyan) ketika ada studi banding di masjid Jogokariyan, tanggal 21 Mei 2005.

Visi kami adalah memfungsikan masjid Jogokariyan ini layaknya fungsi masjid semasa Rosulullah SAW dulu, dan itu adalah jangka panjang, sambil terus dicitil dari sekarang, melalui manajemen yang terus menerus diperbaharui, demikian tandas ketua takmir masjid jogokariyan²⁷.

Ini yang penulis kategorikan sebagai tujuan sekunder dari pemilu raya, yang padahal merupakan grand tujuan bagi para pengurus masjid Jogokariyan. Penulis memandang sebagai tujuan sekunder itu dari segi ke-pemilu-an, karena tujuan tersebut sebenarnya adalah tujuan yang telah ditentukan sebelum terjadinya pemilu, dan bahkan pemilu itu sendiri sebenarnya merupakan kepanjangan dari tujuan tersebut atau bisa dibilang salah satu sarana, namun yang terpenting. Jadi tujuan pokok dari pemilu raya itu adalah memilih ketua takmir masjid.

Dengan data hasil pemilu raya kemarin terpilih Muhammad Jazir, ASP sebagai ketua takmir masjid²⁸ terpilih tanpa adanya insiden yang tidak diinginkan, dan dengan tentu saja 'politik' bersih, walaupun sebenarnya beliau diketahui sebagai salah satu calon yang sudah terpilih sebelum dilaksanakannya pemilu, dikarenakan keberhasilan beliau memimpin takmir masjid Jogokariyan 5 tahun sebelumnya, dengan bukti nyata²⁹.

Ini menggambarkan sebuah nyata pencapaian tujuan secara ideal dalam kegiatan pemilu raya takmir masjid Jogokariyan periode 2004-2008.

²⁷ Wawancara bersama ketua takmir masjid Jogokariyan, Bapak Muhammad Jazir ASP, tanggal 21 Mei 2005.

²⁸ Untuk melihat perolehan suara lihat hlm. 28.

²⁹ Tabloid Insani, edisi Januari 2005. hlm. 15-16.

c. Tentang Target Pemilih

Dalam penentuannya disebutkan bahwa wilayah dakwah masjid Jogokariyan itu mencakup eks wilayah Rukun Kampung Jogokariyan, terdiri dari 4 Wilayah RW, yang membawahi 18 RT. Dihuni oleh 887 kepala keluarga dengan jumlah 3970 jiwa³⁰.

Dalam pentargetan pemilih yang akan diberikan undangan datang ke pemilu, diketahui dalam beberapa surat kabar sekitar 2000 jiwa, namun dengan pembuatan undangan 1.750, ditargetkan akan hadir 1000 warga yang berhak pilih. Dan ternyata setelah acara ini berlangsung, target tersebut bisa terlampaui, dengan melihat jumlah surat suara yang terpakai sebanyak 1.038 dari 1.750 surat suara yang disediakan, berarti ada sekitar 712 jiwa yang berhak pilih tidak menggunakan hak pilihnya. Sedangkan surat suara yang tidak terpakai sekitar 703 buah, setelah dikurangi dengan 9 buah surat suara yang dikembalikan pemilih karena rusak atau keliru coblos³¹.

Pencapaian hasil tersebut tidak lepas dari trik KPT dalam menarik perhatian warga Jogokariyan, itulah yang penulis kemudian sebut dengan fasilitas dan sarana penunjang keberhasilan pemilu raya ini. Diantaranya pengadaan doorprice, kemudian ada bazar baju layak pakai. Ada juga periksa darah gratis, juga pemeriksaan kir mata dan pembagian sembako bagi warga pra sejahtera³².

³⁰ Tulisan Muhammad Jazir, *op.cit.*

³¹ Catatan PPS Pemilu Raya Takmir masjid Jogokariyan dengan ketua Subhan Rizali

³² Lihat hlm. 32.

Namun sebenarnya suasana ramai warga di masjid itu, telah dimulai sejak pasca renovasi masjid yang telah dilakukan sebanyak 3 kali, yang dimulai renovasi pertama tahun 1978, kemudian dilanjutkan tahun 1999 dan tidak kurang dua tahun dari itu lahirlah *masterplan* untuk mengubah bangunan masjid menjadi lebih modern lagi. Sebenarnya renovasi tersebut disebabkan terus bertambahnya jamaah masjid tersebut, hingga kemudian dengan dana bantuan dari para jamaah, bangunan masjid Jogokariyan telah berdiri sekarang, yang menurut laporan telah menghabiskan dana sebesar 1,7 Milyar rupiah³³.

Namun salah satu tujuan pemilu raya itu adalah untuk mengukur seberapa loyal warga Jogokariyan terhadap masjidnya, maka dengan mengukur tingkat kedatangan warga muslim pada acara itu, merupakan sebuah evaluasi tingkat partisipasi yang pas, dengan pengujian selanjutnya lewat pengadaan program yang diminati, tentu saja masjid menjadi sentralnya.

Pengadaan program yang diminati menjadi *follow up* bagi tahapan manajemen masjid, setelah terkumpulnya database mengenai sensus penduduk beserta penyertaan program kegiatan masjid, yang sengaja disodorkan sebagai bentuk pelayanan masjid kepada jamaahnya, dan warga bisa memilih salah satu program yang diminati.

Sekali lagi perlu ditegaskan bahwa pengurus masjid, khususnya KPT ini selalu menjunjung tinggi politik melayani bukan memerintah

³³ Buletin idul fitri, edisi 9/1425 H, hlm. 10.

terhadap jamaahnya. Dengan politik melayani tersebut, jamaah merasa dimakmurkan, itulah makna dari visi masjid Jogokariyan ini yakni “Dari Masjid Memamurkan dan Mensejahterakan Umat”.

Mengenai kesejahteraan menurut ketua KPT, bahwa masjid sering menyediakan penyaluran dana untuk dipanjangtangkan bagi kesejahteraan umat, sebagai contoh, zakat, infaq, shadaqoh serta sisa daging qurban biasanya diatur oleh sebuah lembaga –namanya KAUM- untuk dapat diatur dimana saat jamaah membutuhkan dapat dimanfaatkan secara tepat. Salah satunya ketika pemilu raya ini berlangsung, terdapat sebuah kegiatan pendukung yakni pembagian sembako gratis bagi warga pra sejahtera, barang serta dananya tersebut memakai dari harta umat yang dikelola oleh KAUM tadi³⁴.

B. Identifikasi Dampak Positif dan Negatif

Ada aksi bisa berdampak sebuah reaksi atau bisa jadi ada aksi balas yang juga menantang adanya reaksi, begitu seterusnya. Aksi pemilu raya yang dipandang baru bagi budaya takmir masjid sekarang ini, sudah pasti memiliki dampak yang tidak sedikit, namun apakah dampak yang ditinggalkannya itu bersifat positif ataukah negatif, atau bahkan kedua-duanya ada.

a. Dampak Positif

Sebenarnya secara idealis pengidentifikasian ini sulit sekali, sebab kenapa? Jika kita mencoba mencari dampak pemilu raya yang bersifat idealis para warga terhadap masjid, maksudnya secara keyakinan, dampak

³⁴ Wawancara bersama ketua KPT masjid Jogokariyan, Bapak Nur Hidayanto, S. Far., tanggal 21 Mei 2005.

tersebut susah dibuktikan, karena jika kita mengidentifikasi dampak pemilu raya dengan melihat seseorang yang tadinya jarang ke masjid, lantas setelah pemilu raya, ia menjadi getol. Secara fisik itu adalah sebuah dampak positif, karena ternyata jamaah bertambah, tapi itu menjadi susah jika kita mengidentifikasi keyakinan mereka lewat niat apa mereka ke masjid.

Menurut informasi, dengan terpilihnya ketua takmir masjid secara langsung dipilih oleh warga, berdampak jamaah menjadi merasa akrab dengan takmir masjid, sehingga dengan mudah mereka mulai dibimbing serta diarahkan dalam pemahaman agama dan juga keduniawian³⁵.

Juga kegiatan masjid sekarang banyak sekali diikuti oleh warga, serta tingkat ibadah mahdhoh berupa zakat infaq shodaqoh dan juga qurban makin meningkat jumlahnya. Ini dikarenakan mereka telah sedikit demi sedikit menaruh rasa percaya terhadap masjid, serta mereka mulai mau merealisasikan ajaran agama yang didapat lewat pengajian-pengajian rutin mengenai keutamaan ibadah mahdhoh sosial tersebut.

Hakekatnya agama itu adalah dibutuhkan karena ingin meraih sebuah rasa aman dan tentram, dengan syarat pertama percaya terhadap adanya Allah SWT, yang maha kuasa lagi maha penyayang. Maka semua manusia setelah percaya akan kehendak Allah SWT itu bisa terjadi kapan saja sesuai dengan keridhoannya, maka disini timbul kesadaran bahwa

³⁵ Wawancara bersama ketua takmir masjid Jogokariyan, Bapak Muhammad Jazir, ASP. tanggal 21 Mei 2005.

sekuat apapun kita berusaha tetap yang mejadi penentu akhir adalah kehendak Yang Kuasa.

“Sebenarnya dengan pemilu raya ini kami merasa diberikan pengetahuan mengenai demokrasi, dengan diberikannya hak atas pemilihan serta pencalonan oleh jamaah langsung, kemarin benar-benar terwujud pemilu yang jujur, bersih, fair dan santun”, demikian kiranya salah satu pengakuan jamaah dengan adanya pemilu raya ini³⁶. Dan dengan adanya pemilu raya ini jamaah merasa bertanggung jawab untuk bisa meramaikan masjid, sebab dengan pengurus yang dipilih langsung serta masjid yang telah megah bangunannya ini tidak akan berarti jika tidak diramaikan oleh jamaahnya.

Para jamaah melihat dampak dari pemilu raya ini secara program yang ditawarkan kepada mereka, dan adanya sebuah pelayanan yang riil dari pihak pengurus terhadap jamaahnya. Terutama pada hari pemilu raya itu diadakan beberapa acara pendukung yang bernuansa sosial, itu sangat berdampak baik sekali bagi jamaah.

b. Dampak Negatif

Dalam penjelasannya ketua takmir masjid mengatakan, sampai sekarang dampak negatifnya belum terasa, dan segala sesuatu ciptaan manusia itu pasti tidak akan ada yang sempurna, tapi insya Allah dengan izin-Nya kegiatan tersebut tak akan berdampak negatif bagi warga Jogokariyan.

³⁶ Wawancara bersama Jamaah masjid Jogokariyan, tanggal 1 Juni 2005.

Memang menurut ketua KPT bahwa pernah terjadi kasus penumpangan politik pada pemilihan takmir ini, maka keluar statemen pengurus masjid untuk menghilangkan 'aroma politik' dalam pemilihan takmir ini.

Mengikuti data yang terkumpul, tidak ada sesuatu kinerja sistem masjid yang terganggu, malah yang ada sekarang adalah semua warga Jogokariyan mulai merasa memiliki terhadap masjid mereka dan berusaha yang terbaik untuknya. Ini kemudian diwujudkan pada sebuah program yakni program Kampung Islami bagi kampung Jogokariyan dengan menjadikan masjid sebagai sentral kehidupan umat Islam Jogokariyan, itu memerlukan proses yang panjang, tandas ketua takmir masjid Jogokariyan³⁷.

Dan dampak yang paling ditakuti itu- namun belum ada tanda-tanda- adalah perpecahan jamaah, gara-gara perebutan kekuasaan masjid, ini juga yang dikhawatirkan oleh jamaah, tergambar dari pembicaraannya bersama kami, namun dengan tindakan pencegahan adanya unsur politik dalam pemilu raya, serta upaya KPT mewujudkan pemilu yang fair, santun, dan juga verifikasi calon ketua yang dispesialkan bagi yang memiliki jabatan kekuasaan atau politik untuk dapat mengundurkan diri dari jabatannya tersebut.

Dari pihak jamaah pun tidak merasakan kekhawatiran akan adanya pengaruh partai politik serta perpecahan tersebut, sebab mereka pun telah

³⁷ Wawancara bersama ketua Takmir masjid Jogokariyan, Bapak Muhammad Jazir, ASP. Tanggal 21 Mei 2005.

berkomitmen dan bahkan telah memberikan syarat tersendiri kepada pihak masjid untuk tidak menggunakan masjid sebagai ajang perpolitikan.

C. Faktor Pendukung dan Penghambat

Dalam pelaksanaan sebuah kegiatan sudah tentu terdapat pro dan kontra atau pendukung dan penghambat. Kegiatan pemilu raya merupakan sebuah kegiatan yang menyertakan partisipasi masyarakat banyak, sehingga sangat berpeluang mempunyai penghambat yang lebih besar, dari pada kegiatan yang hanya ditujukan bagi jamaah masjid.

Dari data yang didapat, disimpulkan bahwa partisipasi masyarakatlah yang menentukan kegiatan ini berhasil atau tidak, maka sebelum kegiatan ini KPT terlebih dahulu mendata penduduk sembari mensosialisasikan serta membagikan undangan pemilu raya

Untuk menciptakan partisipasi tersebut diperlukan terlebih dahulu kesadaran terhadap pentingnya suatu kepengurusan yang solid untuk dapat melayani serta menarik jamaahnya³⁸, ini dapat diwujudkan oleh adanya saling komunikasi antara pengurus takmir masjid dengan jamaahnya.

Sedang yang menjadi faktor penghambatnya sebenarnya tidak ada, dikarenakan pemilu raya ini adalah langkah lanjutan dari sosialisasi masjid serta usaha-usaha yang lainnya untuk memberikan pemahaman terhadap jamaah, betapa pentingnya partisipasi mereka untuk menentukan

³⁸ Wawancara bersama jamaah masjid Jogokariyan, tanggal 1 Juni 2005.

kesejahteraan dari masjid itu sendiri disamping pengurus takmir yang solid tentunya³⁹.



³⁹ *Ibid.*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB IV
TELAAH KONSEP FUNGSI MASJID
SEBAGAI MEDIA PEMBELAJARAN DEMOKRASI

A. Urgensi Pembelajaran Demokrasi

*“Segala tindakan yang menyangkut hak orang-orang lain
- yang maksimnya tak sesuai dengan kepublikan adalah tak adil*

-Immanuel Kant

Ketika sebuah kegiatan pemilu sukses digelar, tanpa adanya cacat sama sekali, sebenarnya belum menggambarkan sebuah demokrasi yang solid. Kita harus ingat bahwa pemilu hanyalah satu bagian kecil saja dari demokrasi. Pemahaman secara minimalis terhadap demokrasi tersebut menyebabkan terabaikannya sebuah proses dalam pemilihan tersebut. Secara totalitas demokrasi berarti pemerintahan dari mereka yang diperintah, maka disini tergambar bahwa adanya campur tangan yang urgen dari pihak yang diperintah –rakyat *red.*-. Apa sebenarnya proses yang terabaikan itu? Lantas bagaimana dengan perwakilan rakyat itu sendiri?

Banyak pengamat menganalisis pemilu tahun 2004 kemarin dalam berbagai tinjauan, ada yang mengatakan sebuah tonggak sejarah kedaulatan rakyat, yang dilihat lebih sebagai bentuk nyata dari kehendak rakyat, namun ada juga yang mengatakan pemilu tersebut sebagai sebuah aktivitas politik rakyat, sebuah proses yang terus berkembang sehingga menciptakan pola-pola

politik rakyat yang dikehendaki¹, oleh karena itu sebenarnya pemilu adalah sebuah proses pembelajaran, yang kemudian perlu ditunjukkan berbagai aspek mendasarnya demi pengembangan sebagai penggertak atau pemicu yang tepat bagi penguatan nilai-nilai politik -demokrasi- rakyat².

Proses pembelajaran tersebut seharusnya memang berjalan seperti apa yang dikatakan oleh para pengamat –yang mengatakan pemilu sebagai sebuah proses pembelajarandemookrasi-, namun yang telah kita rasakan pada pemilu kemarin, begitu jauh dari yang kita harapkan. Rakyat begitu terkesampingkan sementara para calon wakil mereka berusaha mati-matian untuk mendapatkan restu serta pengesahan ditengah ketersampingan masyarakat tersebut.

Hendrizar mengatakan seharusnya rakyat dan pemerintah itu tidak dipandang secara terpisah, sebab dalam peta perpolitikan nasional, pemerintah harus memberikan pelajaran demokrasi bagi rakyatnya melalui pemicu politik, sehingga memungkinkan rakyat tersebut dapat memberikan respons kondusif, agar tercapai tatanan politik demokratis yang dicontohkan melalui berbagai aktivitas politik mereka –pemerintah-³.

Konsep pembelajaran demokrasi tersebut mutlak diharuskan bagi rakyat demokratis, supaya mereka dapat memposisikan diri sebagaimana mestinya. Sebenarnya segala aktivitas demokrasi dari pemerintah menjadi sangat berpengaruh bagi pembelajaran tersebut. Pembelajaran tersebut dapat

¹ <http://www.indomedia.com/sripo/2003/08/27/270opl.htm>, Hendrizar, *Urgensi Pembelajaran Politik*, Sriwijaya Post, Rabu 27 Agustus 2003.

² *Ibid.*

³ *Ibid.*

dilakukan dengan memanfaatkan sarana-sarana publik atau sarana yang dapat menjangkau publik, seperti kelurahan, pertemuan desa atau media massa.

Menurut definisi demokrasi adalah pemerintahan dari mereka yang diperintah, menyerahkan kepercayaan begitu saja terhadap pelaku politik hasil pemilu itu tidak cukup untuk dinamakan demokrasi. Mereka yang diperintah harus mendapat akses pengaruh ke dalam sistem demokrasi. Jika dimaksimalkan dalam sistem demokrasi tersebut terdapat sebuah ruang, celah diantara dua pemilihan umum itu harus diisi oleh partisipasi politis warga negara dalam arti seluas-luasnya.

Sebenarnya dalam demokrasi terkenal sebuah teori klasik yang berasal dari Jean Jacques Rousseau, yakni konsep *volonte generale* (kehendak umum). Konsep tersebut lahir dari sebuah masyarakat yang relatif homogen, yakni masyarakat kanton Swiss⁴.

Celah diantara pemilu tadi, sangat bisa terbayang besarnya, jika harus menerapkan konsep *volonte generale*-nya Rousseau di kehidupan majemuk bangsa kita ini, perlu adanya berbagai “perantara” yang diharapkan dapat menutupi celah tersebut. “Perantara” tersebut menjadi jembatan bagi jarak antar kedua aspek pemilihan umum –rakyat dan wakil rakyat- tersebut atau menjadi ajang komunikasi antar keduanya.

Menurut Jorgen Hebarms telah terdapat sebuah penafsiran baru terhadap identifikasi “kedaulatan rakyat” dengan “perwakilan rakyat”, karena seperti disebutkan tadi, bahwa penerapan sebuah konsep demokrasi dalam

⁴ F Budi Hardiman, *Ruang Publik Politis; Komunikasi Politis Dalam Masyarakat Majemuk*, <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0408/04/Bentara/1188914.htm>.

masyarakat plural akan menghasilkan sebuah celah antara dua pemilihan umum –rakyat dan wakil rakyat-. Maka Hebarmas dalam sebuah karyanya *Strukturwandel der Oeffentlichkeit* (Perubahan Struktur Ruang Publik), kedaulatan rakyat adalah “totalitas bentuk” dan “isi komunikasi” tentang persoalan-persoalan publik yang berlangsung, baik dalam sistem politik (eksekutif, legislatif dan yudikatif) ataupun dalam masyarakat luas. Kemudian kedaulatan rakyat tersebut didefinisikan sebagai sebuah ruang publik politis yang menurutnya adalah kondisi-kondisi komunikasi yang memungkinkan warga negara membentuk opini dan kehendak bersama secara diskursif⁵. Pengertian inilah yang penulis maksud sebagai sebuah “perantara” yang dengan mengacu kepada pengertian publik, ruang tersebut mungkin dimasuki siapa saja. Namun kondisi seperti apa yang diacu oleh Hebarmas?

Kondisi-kondisi tersebut ialah: *Pertama*; partisipasi dalam komunikasi politis tersebut hanya mungkin jika menggunakan bahasa sama dengan semantik dan logika yang konsisten. *Kedua*; semua partisipan dalam ruang publik politis mempunyai peluang yang sama untuk mencapai suatu konsensus yang fair dan memperlakukan mitra komunikasinya sebagai pribadi otonom yang mampu bertanggung jawab dan bukanlah sebagai alat yang dipakai untuk tujuan-tujuan di luar diri mereka. *Ketiga*; harus ada aturan bersama yang melindungi proses komunikasi dari penindasan dan diskriminasi, sehingga partisipasi dapat memastikan bahwa konsensus dicapai hanya lewat argumen yang lebih baik. Secara singkat bahwa ruang publik politis harus “inklusif”.

⁵ *Ibid.*

“egaliter”, dan “bebas tekanan”⁶. Lantas ruang seperti apa yang inklusif, egaliter dan bebas tekanan itu?

Kita harus memahami pengertian ruang publik itu secara normatif, yakni tidak terbatas kepada sebuah forum resmi atau sebuah panggung yang sengaja dibuat untuk acara komunikasi politik publik, akan tetapi lebih dari itu, diluar kesengajaan yang dibuat, diluar suatu forum resmi yang dibiayai serta mungkin juga ditanggung oleh pihak yang berkepentingan secara pribadi atau golongan. Contohnya kita dapat menemukan sebuah ruang yang bebas dimasuki oleh setiap anggota publik, misalnya di sebuah ajang protes, aksi advokasi, forum perjuangan hak asasi manusia, perbincangan politis interaktif di televisi atau radio, percakapan di pojok-pojok warung dan sebagainya.

Dalam tulisan ini akan mencoba menganalisis sebuah ruang publik politis atau sebuah perantara, yang dimungkinkan untuk dapat memberikan sebuah pembelajaran demokrasi bagi masyarakatnya, yakni masjid. Dengan kapasitas sebagai pusat kebudayaan umat Islam, penulis pandang sangat mungkin jikalau masjid dimasukkan sebagai sebuah tempat yang dapat mewujudkan sebuah ruang publik untuk pembelajaran demokrasi bagi umatnya. Tapi mungkin disini terjadi penyempitan pengertian publik, apakah hanya khusus bagi umat Islam? Apakah publik negara ini hanya umat Islam?

Dalam hal ini memang diakui agak menyimpang dari pengertian publik, namun justru di sini sengaja mengkhususkan pengertian publik tersebut pada umat terbesar di negara ini, karena banyak peristiwa kontradiktif

⁶ *Ibid.*

antara umat Islam dengan pemerintah. Konflik tersebut menjadi sebuah batu sandungan yang dapat menghalangi ter-realisisinya demokrasi di negara Indonesia ini.

Kuntowijoyo dalam bukunya *Muslim Tanpa Masjid* membenarkan sering adanya ketegangan antara umat Islam dengan pemerintah, terutama ketika masa marjinalisasi yang dikutukkan kepada umat Islam. Akibatnya umat Islam selalu dikarantina dalam perpolitikan dan Islamo-phobia merajalela. Dalam bukunya tersebut Kuntowijoyo mengetengahkan sebuah strategi baru bagi umat Islam guna menerobos dan ikut kembali secara intens, aktif dalam kehidupan bernegara atau jelasnya berpolitik. Langkah pertama ialah *Deideologisasi*, artinya bukan deIslamisasi, akan tetapi maknanya umat Islam dituntut untuk dapat “ngelmu begja”, “kanan kiri OK”, sehingga umat Islam bisa masuk kemana saja dan dapat melebarkan sayap selebar-lebarnya. Kemudian menggantikan *conspiration theory* (teori persekongkolan) dengan *factual analysis*. Jangan terburu-buru mengambil kesimpulan atas dasar dugaan semata (*su'udzan*), pantaslah jika terlebih dahulu mencari, mengumpulkan serta menganalisa suatu isu atau kejadian baru kemudian menyimpulkan. Langkah selanjutnya mengganti *jihad psyche* dengan *falah psyche*. Semangat jihad –yang terkadang disalahartikan- digantikan dengan semangat membangun kesejahteraan⁷.

Sebenarnya sebuah konflik tidak selalu ada antara kubu Islam dengan pemerintahan, bisa saja umat lain dengan pemerintah atau bahkan antar publik

⁷ Kuntowijoyo, *Muslim Tanpa Masjid; Esai-Esai Agama, Budaya, dan Politik dalam Bingkai Strukturalisme Transendental*, cet II (Bandung: Mizan, 2001), hlm. 311-315.

yang berbeda agama. Sering sebuah ajang politik berubah menjadi ajang pertempuran berdarah dan bahkan meminta korban. Disana politik tidak harus menjadi kambing hitam, yang harus dipermasalahkan adalah kualitas berpolitik dari setiap diri manusia di negara ini.

B. Analisis Fungsi Masjid Sebagai Media Pembelajaran Berdemokrasi

Masjid adalah simbol Islam yang menjadi barometer bagi keberhasilan agama tersebut. Sebagai simbol yang berkapasitas memancarkan keemasan Islam, masjid mempunyai kriteria persis dengan agama Islam itu sendiri, yakni masjid tidak mengenal pemisahan urusan dunia dengan akhirat sebagaimana yang Islam ajarkan. Maka sungguh telah salah duga apabila ada yang mengatakan Islam tertutup bagi politik.

Dalam terma politik ada yang dinamakan sistem demokrasi yang mempunyai persamaan dengan prinsip *syuro* dalam teladan Islam (Q S 42: 37, 3: 159). Dalam prinsipnya demokrasi tidak mengenal praktek kekerasan yang dilakukan dengan senjata dan kendaraan lapis baja yang bersifat menekan, diktator-otoriter. Menurut Muhammad Shahrur, sama seperti shalat yang mempunyai teknik, begitu pula dengan *syuro*, dan penemuan teknik paling kontemporer di dalam *syuro* tersebut adalah demokrasi⁸.

Namun diakui bahwa demokrasi bukanlah sebuah final yang mesti diambil begitu saja, teknik dalam *syuro* ini akan terus berkembang sejalan dengan perwujudan nilai serta teladannya. Harus diadakan upaya pengoptimalan teknik untuk mencapai tujuan yang maksimal.

⁸ Dadang Kahmad, *Agama, Demokrasi dan Pemberdayaan Masyarakat*, <http://www.pikitan-rakyat.com/cetak/0804/05/0802.htm>

Demokrasi merupakan sesuatu yang penting dalam pemerintahan demokratis, begitu pula dengan *syuro* (musyawarah) yang bermakna norma kemanusiaan yang sangat penting serta menjadi doktrin kemasyarakatan dan kenegaraan yang pokok dalam penyelenggaraan kekuasaan, terutama yang berkaitan dengan hukum, politik, ekonomi dan perundang-undangan. Norma ini telah melekat dalam setiap realitas kehidupan manusia itu sejak awal hingga sekarang. Singkatnya *syuro* adalah nilai dalam wilayah norma-norma, sementara demokrasi adalah bentuk teknis dalam kehidupan nyata⁹.

Sebuah teknik akan terus berkembang. Jika sekarang banyak terjadi kerusuhan akibat teknik tersebut, maka yang dipermasalahkan bukan hanya teknik tersebut, akan tetapi kualitas partisipan harus mendapat sorotan yang berarti pula. Pemilihan umum adalah temuan terbaik dalam demokrasi saat ini, namun jika pemilu tersebut tidak berjalan secara demokratis, yang perlu diperhatikan adalah pemahaman publik terhadap apa yang namanya politik atau di sini pemberdayaan politik serta pencerdasan partisipasi politik publik menjadi penting adanya. Pemberdayaan tersebut dimaksudkan agar masyarakat dapat menjaga dan mengawasi pelaksana teladan-teladan utama agama dalam penyelenggaraan kekuasaan; dan dalam rangka pendidikan serta penyadaran partisipasi masyarakat untuk melakukan pertimbangan-pertimbangan rasional dan menolak berbagai praktek politik yang tidak mengacu pada teladan-teladan utama mereka¹⁰.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*

Dalam hal pemberdayaan ini Islam menganjurkan pula, yakni sebagai pengimplementasian terhadap norma *yad'una ila khair* (mengajak kepada kebaikan) dan *al-amr bi al-ma'ruf wa an-nahy an al-munkar* (menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran (Q.S 3: 104). Norma ini bermakna bahwa pembelajaran demokrasi bagi masyarakat adalah sebuah pendidikan dan penyadaran masyarakat agar berpikir dan berperilaku politik secara rasional dengan menjalankan teladan-teladan yang diterima secara nalar dan sosial, serta menghindari praktek politik yang tidak sesuai dengannya¹¹.

Demokratisasi adalah campuran antara *nahi munkar* dan *amar ma'ruf*, demikian Kuntowijoyo menggambarkan. Demokrasi itu menjadi sebuah *nahi munkar* ketika mengingat struktur harus dicegah, dengan maksud menghilangkan penekanan atau diskriminasi terhadap masyarakat. Demokrasi suatu waktu menjadi *amar ma'ruf*, ketika masyarakat harus diberi sebuah pengertian, ketika masyarakat memerlukan pemahaman terhadapnya¹². Maka dengan tujuan itulah demokratisasi menjadi sebuah kebajikan serta kemashlahatan bagi umat.

Dengan kapasitas Islam sebagai rahmatan lil alamin maka masjid sebagai pusat peradabannya telah sangat dapat untuk dijadikan sebagai perantara pembelajaran demokrasi bagi umatnya. Kesadaran berdemokrasi harus kita tumbuhkan pada setiap diri masyarakat khususnya masyarakat Islam, dan kesadaran tersebut dibarengi dengan pengetahuan betapa

¹¹ *Ibid.*

¹² Kuntowijoyo, ...*op.cit.*, hlm.47.

Rosulullah SAW dahulu telah membina politik kenegaraan beserta kontrol masyarakatnya dari satu tempat yang bernama masjid.

Jika sekarang kita berbicara bahwa memang dahulu Rosulullah SAW seperti itu, namun sekarang politik telah berubah tidak sejalan lagi dengan Islam, maka sangat riskan jika didalam masjid ada aktifitas politik. Menurut penulis sikap seperti itu tidak layak dimiliki oleh umat Islam, terutama oleh pengurus masjid, kenapa? Yang bermasalah itu sistem politiknya atau bahkan pemahaman kita yang begitu sempit terhadap politik, sehingga bukan peran dan fungsi masjidnya yang bermasalah, maka jangan mengerucutkan fungsi masjid yang telah diterapkan oleh Rosulullah SAW. Seharusnya kita sadar bahwa Islam adalah agama yang komprehensif dalam masalah dunia dan akhirat, dan jantung kehidupan Islam itu ada pada masjid, maka jika fungsi masjid dikerucutkan sama halnya kita mensekulerkan agama Islam. Kita tahu yang menyimpang itu adalah "sistem politik" sekarang, maka sudah sewajibnyalah bagi Islam untuk meluruskannya.

Kita belum mampu untuk mengubah secara total langsung melalui elit politik dan bahkan mungkin umat Islam akan disingkirkan kembali dari dunia perpolitikan. Maka pilihan yang tepat adalah membina pemahaman demokrasi lewat pembelajaran demokrasi, tentang bagaimana seharusnya berdemokrasi yang baik, serta apa kewajiban serta tanggung jawab kita dalam politik, tentang mengapa kita harus berpolitik, tentang bagaimana menciptakan kesejateraan masyarakat secara politik kenegaraan, tentang informasi sekitar program-program pemerintah. Itulah seharusnya yang kita lakukan, dan kegiatan

tersebut sangat kondusif jika diadakan atau diberikan pada tempat yang sering dikunjungi oleh umat Islam, yakni masjid.

Dalam konteks ini penulis ingin mengkaji sebuah kegiatan yang dipandang sebagai sebuah terobosan baru bagi dinamika kehidupan umat Islam sekarang ini. Yakni sebuah pemilu takmir masjid yang diselenggarakan oleh sebuah pengurus masjid, dengan tujuan mulia mereka yang tergambar dalam visi masjid tersebut “Dari Masjid Memakmurkan dan Mensejahterakan Umat”.

C. Analisis Pemilu Raya Sebagai Salah Satu Pembelajaran Demokrasi

Konsep pemilu raya sebenarnya digulirkan untuk menggambarkan betapa pihak masjid menginginkan sebuah pemerintahan umat –jamaah- itu terpusat pada masjid, tanpa mau menyaingi negara sendiri tentunya. Melalui pemilu raya pihak masjid berharap umat dapat berpartisipasi sekaligus mempunyai rasa tanggung jawab atas apa yang mereka pilih masing-masing –maksudnya pemimpin-.

Dengan penggunaan kata pemilu, sebenarnya secara eksplisit mereka telah mengadopsi sistem demokrasi, yang memandang kedaulatan tertinggi ada pada rakyat dimana pemerintahan dijalankan oleh mereka langsung atau oleh wakil-wakil mereka yang mereka pilih lewat sistem pemilihan yang bebas –tanpa tekanan dari pihak tertentu-¹³. Kepemimpinan demokratis adalah model kepemimpinan yang mana pemimpinnya berusaha menyikonkan antara

¹³ Muhadi Zainuddin & Abd Mustaqim, *Studi Kepemimpinan Islam; Telaah Normatif & Historis*, cet I (Yogyakarta: Al-Muhsin Press, 2002), hlm. 46.

kepentingan dan tujuan organisasi dengan kepentingan dan tujuan orang yang dipimpinnya¹⁴.

Demokrasi sering dipahami secara implisit dari kata *demos* yang berarti rakyat. Mengenai model pemerintahan ini umat Islam terbagi menjadi tiga golongan dalam hal mereka memandang dan menerima model ini:

- a. Mereka yang menolak secara total model ini dengan alasan itu adalah produk dari Barat, bukan lahir dari Islam. Secara normatif, dalam Islam tidak pernah ada padanan kata yang searti dengan demokrasi, sehingga yang bukan dari Islam tidak patut untuk diikuti.
- b. Golongan yang menerima demokrasi dengan alasan walaupun memang dalam Islam tak ada padanan kata yang berarti demokrasi, serta itu sistem Barat, namun secara substansi sistem ini sama dengan sistem *syuro* (musyawarah) dalam Islam.
- c. Kelompok yang melakukan sintesa-kreatif terhadap demokrasi dengan memilih prinsip-prinsipnya yang sesuai dengan Islam¹⁵ saja, sedang yang tidak sesuai mereka abaikan¹⁶.

Dari pembicaraan dengan ketua KPT masjid Jogokariyan, tergambar sekali kemana mereka dapat penulis kategorikan. Secara kasar mereka menolak apa yang namanya demokrasi tersebut, namun mereka menyadari ada beberapa prinsip demokrasi yang sama dalam Islam. Disadari atau tidak sebenarnya mereka telah menggunakan salah satu sistem demokrasi, yakni

¹⁴ *Ibid*, hlm. 12.

¹⁵ Prinsip tersebut ialah: kebebasan (*al-Hurriyyah*), keadilan (*al-'Adalah*), permusyawaratan (*Syura*) dan equality (*al-Musuwah*), lihat *Ibid*, hlm. 50.

¹⁶ Lihat *Ibid*, hlm. 48-49.

pemilihan secara bebas oleh rakyat, konteks ini sama halnya ketika Islam memposisikan pemilihan melalui musyawarah, maka dengan selektifitas tinggi mereka penulis masukan pada golongan yang ketiga.

Dari pemetaan diatas, penulis kategorikan masjid tersebut terbebas dari pençurigaan pemberontakan terpimpin atau terlepas dari prasangka akan melakukan kudeta pemerintahan. Ini sebuah pembaruan politik Islam secara mendasar pada masjid, yakni dengan keyakinan bahwa pengurus takmir masjid adalah sebagai pelayan bagi jamaah, maka fungsi tersebut tepat sekali dengan fungsi pemerintahan negara demokratis yang tidak hanya melihat kepentingan diri dan golongan, akan tetapi mereka memperhatikan juga kepentingan jamaah.

Di sini pihak masjid ingin menjadi sebuah sistem yang dapat mengontrol masyarakat mereka –sesuai dengan wilayah dakwahnya¹⁷- sekaligus mengarahkan dan membimbing mereka dalam menuju *sirat* –jalan-keridhoan Allah SWT, sehingga sekali lagi peran agama Islam menjadi bukan hanya wacana semata, akan tetapi benar-benar diwujudkan dengan menjadikan sarana terpenting mereka –umat Islam-, yang sekaligus menjadi tempat berkumpul mereka yakni masjid untuk lebih optimal dalam menjalankan peran dan fungsi bagi umatnya.

Pemahaman seperti ini telah dianut oleh pengurus takmir masjid Jogokariyan sehingga dengan itu mereka berusaha supaya masjid bukan hanya

¹⁷ Untuk ini lihat hlm 48.

untuk urusan langit akan tetapi mencakup urusan dunia serta akhirat¹⁸, serta pemahaman tersebut mereka coba eksplorkan terhadap jamaahnya sehingga ada sebuah keseimbangan serta persamaan persepsi terhadap peran dan fungsi masjid tersebut.

Di sinilah politik Islam dapat dilihat sebagai politik yang dibangun untuk menciptakan sebuah kekuasaan yang mengatur sosial serta ekonomi rakyat berdasarkan keyakinan. Ini tergambar dalam visi masjid Jogokariyan yakni “Dari Masjid Memakmurkan dan Mesejahterakan Umat”. Seharusnya dibuat sebuah bab dalam tulisan ini untuk mengkaji secara benar-benar mengenai visi ini sehingga tidak terjadi salah persepsi. Namun setidaknya dalam tulisan ini akan diulas apa makna visi tersebut?.

Dalam penjelasannya ketua takmir masjid Jogokariyan, Bapak Muhammad Jazir, menyatakan bahwa kami semua pengurus takmir masjid menginginkan dengan adanya kepengurusan takmir ini, jamaah terlayani serta terkontrol sehingga mereka tidak merasa diterlantarkan atau dipaksa. Kami ingin menciptakan sebuah sistem pemerintahan umat yang tersentral di masjid¹⁹. Apa itu sistem pemerintahan umat?

Sistem pemerintahan umat mereka maksudkan sebagai sebuah cara atau sistem melayani umat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sekaligus mencoba membimbing mereka untuk terus berada pada jalan yang diridloi oleh Allah SWT. Mengapa di masjid? Balik ke sejarah Rosulullah SAW

¹⁸ Bisa dibaca Buletin Idul Fitri masjid Joogokariyan edisi 9/ 1425 H.

¹⁹ Wawancara bersama ketua takmir masjid Jogokariyan, Bapak Muhammad Jazir, ASP. Tanggal 21 Mei 2005.

dahulu, beliau telah berhasil menduniakan Islam dari satu tempat yang bernama masjid, maka itulah kiranya makna tema tersebut²⁰.

Dari perkataan terlayani dan terkontrol diatas, penulis tangkap sebagai esensi tugas politik bagi pengurus takmir masjid dengan memakai sebuah sistem pemerintahan ala masjid jaman Rosulullah SAW. Namun seperti yang disebutkan terdahulu dalam tulisan ini, bahwa masjid itu tempat ibadah sekaligus pusat kebudayaan umat Islam, termasuk politik dan negara, apakah akan terjadi penempatan posisi *ideological scapegoat* kembali bagi umat Islam dengan aksi pembuatan pemerintahan ala masjid tersebut?

Ketua KPT, Bapak Nur Hidayanto mengatakan kegiatan pemilu raya ini diusahakan bersih dari 'politik', dalam verifikasi KPT terhadap calon kandidat, salah satunya berbunyi calon tidak memiliki jabatan dalam 'politik' atau bersedia mengundurkan diri, kita tidak mau masjid dijadikan ajang 'per'politik'an²¹.

Dari perbincangan tersebut penulis teringat tulisannya Amien Rais dalam sebuah bukunya, beliau menyitir pendapat para peserta diskusi panel di Yogyakarta yang mengutip pendapat pakar Barat mengenai esensi politik. Harold Lasswell mengatakan politik itu kegiatan masyarakat yang berkisar pada masalah-masalah "siapa memperoleh apa, kapan dan bagaimana (*who gets what, when, and how*)"²². Dalam bukunya tersebut Amien

²⁰ *Ibid.*

²¹ Wawancara bersama ketua KPT masjid Jogokariyan, Bapak Nur Hidayanto, S.Far., tanggal 21 Mei 2005.

²² Amien Rais, *loc.cit*, hlm. 2.

mengungkapkan adanya kekurangan pada esensi politik tersebut yakni dengan menambahkan kata *why*, mengapa seseorang harus berpolitik?.

Inilah yang disebut dengan perubahan kultural oleh Kuntowijoyo, yakni mengubah cara berpikir perorangan, tidak berusaha mengubah kolektivitas²³. Cara pandang individual sangat berpengaruh terhadap kemajuan kolektivitas dan mengubah cara pandang dengan pendekatan individual lebih efektif ketimbang mengubah secara drastis besar-besaran lewat kekuasaan atau politik. Strategi kultural ini dengan kata lain mengubah dari dalam diri sendiri, yakni dalam tubuh umat Islam dengan alasan agama adalah kekuatan moral, berarti tidak ada paksaan dan semuanya harus datang dari dalam.

Kembali ke idealisme masjid Jogokariyan, inilah yang menjadi pengertian politik yang dipegang oleh pengurus takmir masjid Jogokariyan – tanpa *why*-, maka mereka menolak adanya singgungan politik terhadap pemilu raya. Mereka mengerucutkan pengertian politik ke dalam perebutan kekuasaan –kursi jabatan- yang sekarang banyak diberdayakan lewat partai politik²⁴, jadi jangan sampai umat dibodohi dengan memanfaatkan simbol agama, apalagi menggunakan masjid sebagai alat salah satu partai politik, untuk mendapatkan sebuah kursi jabatan.

Mengenai partai politik Islam, sedikitnya Kuntowijoyo mengutarakan enam alasan mengapa partai politik tidak harus dibentuk atau bisa dibilang suatu kesalahan jika mendirikan parpol Islam. *Pertama*; terhentinya mobilitas sosial. Karena umat Islam mempunyai tanggung jawab sosial dalam

²³ Kuntowijoyo, ... *op.cit*, hlm. 120.

²⁴ Dapat dilihat Buletin Idul Fitri, edisi 8/ 1424 H.

penyebaran agama, sehingga jika memaksakan diri berkecimpung dalam parpol, maka dapat dikatakan umat Islam tidak akan sepenuhnya mengembangkan SDM-nya, dikarenakan tanggung jawab yang sudah sekian melekatnya. *Kedua*; disintegrasi umat. Sudah jelas dapat dilihat bagaimana terpecahnya umat Islam, jika bermunculan banyak parpol Islam, dikarenakan tingginya ideologi mereka untuk membela apa yang diyakininya. *Ketiga*; umat menjadi miopis. Politik hanya memikirkan masalah-masalah jangka pendek, dikhawatirkan jika umat berkecimpung dalam parpol Islam, maka pandangan mereka pun menjadi hanya mampu melihat realitas yang dekat-dekat saja. *Keempat*; pemiskinan agama. Agama itu pedoman hidup, sebagai penerang kehidupan umat dalam berbagai masalah. Dengan didirikannya parpol Islam, terjadilah pemiskinan agama yang hanya dikhususkan melulu kepada politik, padahal agama itu sangat kaya, sarat dengan interpretasi dan bermakna bagi semua aspek kehidupan umat. *Kelima*; runtuhnya proliferasi. Yakni penyebaran kepemimpinan umat. Figur *the* tokoh bukan hanya ada pada arah politik *-a* tokoh- *an sich*. Akan tetapi kepemimpinan umat bisa multi dimensi atau multi profesi, tidak hanya seorang tokoh politik. Maka dikhawatirkan dengan adanya parpol Islam semua figur kepemimpinan Islam dalam ke-multi profesi-annya akan luntur hanya dengan munculnya *a* tokoh politik. *Keenam*; lahirnya alienasi generasi muda. Yakni generasi yang mulai mencopot sektarianisme-nya, ini terjadi karena mobilitas geografis dan generasi mengambang. Generasi ini tidak lagi terkungkung dengan aliran keislaman

mereka –apakah itu NU atau Muhammadiyah-, mereka tidak lagi menghayati aliran-aliran keagamaan, asal Islam itu boleh²⁵.

Jika melihat cita-cita mulia dari pengurus takmir masjid Jogokariyan, dengan ingin memfungsikan masjid seperti pada zaman Rosulullah SAW, saya mengira dalam tubuh kepengurusan tersebut menyetujui akan adanya aktifitas politik di dalam masjid, namun mereka menolak akan adanya ‘politik praktis’ –yang sering diartikan dari segi kepartaian- dalam pelaksanaan pemilu raya tersebut. Menurut penulis makna yang diberikan dalam ‘Dari Masjid Memakmurkan dan Mensejahterakan Umat’ itu dikecualikan masalah partai politik, dan ini telah sejalan strategi kultural atau sesuai dengan imbauan *Islam Yes, Partai Islam No!*.

Mengenai partai politik, sebenarnya merupakan aspek penting dalam pelaksanaan politik. Ada yang mengatakan fungsi partai sebagai kepanjangan tangan rakyat untuk menyampaikan amanatnya terhadap wakil mereka yang ada di pemerintahan, namun tak sedikit pula yang mengartikan sebagai kendaraan pengantar ke kursi kekuasaan.

Seharusnya partai politik menjadi sebuah pemicu keberhasilan pemerintahan demokrasi di negara ini, bukan malah menjadi bumerang yang makin menjadi. Partai seharusnya memberikan pemahaman berpolitik terhadap rakyat agar dapat melakukan fungsi hak dan kewajiban mereka dalam pemerintahan sebagaimana mestinya.

²⁵ Kuntowijoyo....*op.cit.* hlm.325-332.

Memang sulit untuk menentukan mana partai yang baik dan buruk sekarang ini, karena fungsi partai telah hilang tertimbun keserakahan kekuasaan, sehingga pantas jika pengurus masjid Jogokariyan menolak kepartaian, mereka takut dipecah belah oleh partai, dengan saling iri dengki antar sesama muslim gara-gara memperebutkan kursi kekuasaan.

Jadi pemerintahan seperti apa yang diinginkan oleh pengurus takmir masjid Jogokariyan? Kita bisa menelusurinya dengan memperhatikan visi yang mereka usung yakni “Dari Masjid Memakmurkan dan Mensejahterakan Umat”. Dengan politik melayani kepentingan jamaah mereka menginginkan sebuah kemapanan masyarakat, kedewasaan masyarakat serta kekompakan masyarakat, yang kemudian dapat mengubah masyarakat itu sendiri menjadi makmur dan sejahtera dengan dibina serta dibimbing oleh masjid sebagai tempat atau pusat kehidupan umat Islam.

Jika kita tarik ke sistem pemerintahan dan politik yang dianut oleh bangsa kita, penulis telah mengatakan sebenarnya pemilu raya ini adalah sebuah kegiatan yang mengusung demokrasi –tanpa embel-embel pancasila- yang dianut oleh bangsa kita, demokrasi itu dipergunakan bukan hanya untuk negara saja akan tetapi bisa merambah ke organisasi-organisasi yang lebih kecil²⁶. Dan pada politik melayani yang diterapkan oleh pengurus takmir masjid Jogokariyan tercakup ciri-ciri dari sistem demokrasi. Dengan uraian ini penulis mengkategorikan sebenarnya yang ingin dibangun oleh pengurus

²⁶ Lihat hlm. 17.

takmir masjid Jogokariyan itu adalah sebuah pemerintahan demokrasi yang sebenarnya.

Dalam GBHN –Garis-garis Besar Haluan Negara- dikatakan pentingnya pendidikan demokrasi dengan memanfaatkan kondisi-kondisi serta situasi yang memungkinkan terlaksananya pembaharuan kehidupan politik, sehingga dapat diciptakan keadaan dengan sistem politik yang benar-benar demokratis, stabil, dinamis, efektif dan efisien yang dapat memperkuat kehidupan konstitusional²⁷.

Dari sana dapat ditemukan sebuah pengharapan sekaligus menjadi tanggung jawab bagi pemerintahan untuk mewujudkan kehidupan politik yang demokratis setiap kali ada kesempatan. Kondisi dan situasi yang memungkinkan itu sebenarnya dapat kita temukan pada kegiatan organisasi-organisasi kecil dibawah negara, baik itu disekolah atau kelurahan atau kecamatan, termasuk didalamnya organisasi kepengurusan masjid.

Dengan sasaran dakwah yang sudah ditetapkan sebenarnya masjid lebih strategis untuk mengajarkan demokrasi demi terciptanya kehidupan konstitusional yang benar-benar demokratis. Karena masjid sebagai tempat berkumpulnya umat Islam dari berbagai lapisan masyarakat. Maka peran dan fungsi masjid sebagai media pembelajaran politik bagi masyarakat –umat Islam khususnya-, salah satunya dengan melaksanakan pemerintahan jamaah yang terpusat di masjid dapat terwujud.

²⁷ A. Henkesj & Yulia Gunawan, *op.cit*, hlm. 181-182.

Materi politik yang akan diajarkan pada masyarakat sudah tentu harus yang bernafaskan Islam, atau minimal ada kesamaan visi politik Islam, yakni untuk menciptakan kemaslahatan melalui pengaturan sosial dan ekonomi yang berlandaskan al-Quran dan hadits serta hasil ijtihad²⁸ sesuai situasi dan kondisi. Dalam melihat demokrasi, seperti disebutkan didepan terdapat tiga golongan, dan penulis lebih condong kepada golongan ketiga yang dengan melakukan sintesa kreatif dalam menerima demokrasi.

Sebenarnya hubungan Islam dengan tata negara menurut Munawir Sadzali, terdapat tiga kelompok²⁹ yang mempunyai pandangan berbeda, diantaranya:

- 1) Kelompok yang berpandangan bahwa Islam bukanlah agama dalam pengertian Barat, akan tetapi Islam adalah agama yang sempurna, yang lengkap dengan pengaturan bagi segala aspek kehidupan manusia termasuk kenegaraan. Tokoh yang berpandangan seperti ini diantaranya: Syaikh Hasan al-Banna, Sayyid Qutb, Rasyid Ridho dan Maulana A. A Maududi.
- 2) Islam adalah agama dalam pandangan Barat yang hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, tidak mengatur masalah ketatanegaraan. Tokohnya ialah: Ali Abd al-Razik dan Thoha Husein.
- 3) Berpandangan bahwa memang dalam Islam itu tidak diatur masalah ketatanegaraan namun bukan berarti Islam dalam pandangan Barat itu

²⁸ Sidi Gazalba, ...*loc. cit.*

²⁹ Abddin Natta, *Metodologi Studi Islam*, cet. VIII (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), hlm. 274-275.

benar, mereka berpendapat bahwa dalam Islam terdapat seperangkat tata nilai bagi etika bagi kehidupan bernegara.

Dengan asumsi bahwa dalam Islam juga ada pengaturan ketatanegaraan dan etika bernegara, yang salah satunya ada aturan bahwa taat kepada pemerintah ditempatkan pada urutan ketiga setelah taat kepada Allah SWT dan Rosulullah SAW-Nya, maka dari itu dalam menerima demokrasi penulis lebih memilih golongan ketiga yang melakukan verifikasi ketat terhadap sistem pemerintahan tersebut.

Jadi dalam materi politik yang dibelajarkan terhadap jamaah, harus dapat mewakili politik Islam yang digabungkan dengan pemahaman demokrasi yang diterapkan pada tata pemerintahan di negara kita ini. Maka jamaah tidak lagi salah memahami demokrasi, dan bukan memaksakan kehendak untuk membangun negara Islam, akan tetapi yang terpenting adalah sistem pemerintahan yang didalamnya terkandung nilai-nilai Islam.

Pemilu raya ini adalah sebuah pembelajaran politik bagi rakyat, yakni dengan adanya pemilihan yang jujur dan adil, tanpa ada tekanan atau paksaan dalam menentukan pilihan, mereka dapat menyalurkan pendapat mereka melalui forum pemilu ini. Dalam pemilu ini ada persyaratan bakal calon takmir yang sangat ketat, sehingga tidak sembarang orang yang jadi pemimpin. Pertanggung jawaban dilakukan secara berkala setiap akhir tahun –biasanya bertepatan dengan idul fitri- dan musyawarah terbuka dilakukan setiap ba'da shalat jum'at pada penanggalan kliwon.